



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
KOMISI VI DPR RI
RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN DIREKTUR UTAMA
PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (PERSERO)/MIND ID**

Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke-	: 5 (Lima)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 03 Juni 2024
Waktu	: Pukul 10.40 s.d. 14.39 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. 1 Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat	: Aria Bima (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-PDIP)
Acara	: 1. Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023; dan 2. Lain-lain
Sekretaris Rapat	: Dewi Resmini, S.E., M.Si. (Kabag Sekretariat Komisi VI DPR RI)
Hadir	: A. ANGGOTA DPR RI: 32 dari 55 orang Anggota dengan rincian:

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN (F-PDIP)**

9 dari 12 orang Anggota

1. Aria Bima
2. Prof. Assc. Dr. Darmadi Duriyanto, S.E., M.B.A.
3. Rieke Diah Pitaloka
4. ST. Ananta Wahana, S.H., M.H.
5. Sonny T. Danaparamita
6. M. Hasbi Asyidiki Jayabaya, S.H.
7. Sondang Tiar Debora Tampubolon
8. Dr. H. Mufti A. N. Anam
9. I Nyoman Parta, S.H.

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)

7 dari 8 orang Anggota

1. M. Sarmuji, S.E., M.Si.
2. Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P.
3. Ir. H. Mohamad Idris Laena, M.H.

4. H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
5. Doni Akbar, S.E., M.M.
6. Nusron Wahid
7. Drs. H. Dadang S. Muchtar

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F-P. GERINDRA)

5 dari 8 orang Anggota

1. H.M. Husni, S.E., M.M.
2. Khilmi
3. Ir. H. La Tinro La Tunrung
4. Muhammad Husein Fadlulloh, B.Bus., M.M., M.B.A.
5. Mulan Jameela

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-P. NASDEM)

3 dari 6 orang Anggota

1. Martin Manurung, S.E., M.A.
2. H. Rudi Hartono Bangun, S.E., M.A.P.
3. H. Subardi, S.H., M.H.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

1 dari 6 orang Anggota

1. H. Ali Ahmad

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

2 dari 5 orang Anggota

1. Dr. Ir. Herman Khaeron, M.Si.
2. Hj. Melani Leimena Suharli

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

2 dari 4 orang Anggota

1. Amin AK, M.M.
2. Hj. Nevi Zuairina

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

2 dari 4 orang Anggota

1. Eko Hendro Purnomo, S.Sos.
2. Hj. Intan Fauzi, S.H., LL.M

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

1 dari 2 orang Anggota

1. Elly Rachmat Yasin

B. UNDANGAN:

1. Direktur Utama PT Mineral Industri Indonesia (Hendi Prio Santoso) beserta jajaran
2. Direktur Utama PT Aneka Tambang (Nicolas D. Kanter) beserta jajaran
3. Wakil Direktur Utama PT Freeport Indonesia (Jenpino Ngabdi) beserta jajaran
4. Direktur Keuangan PT Indonesia Asahan Aluminium (Devy Pradnya Paramita) beserta jajaran
5. Direktur Utama PT Timah (Ahmad Dani Virsal)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Untuk rapat pada pagi hari ini, Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Mineral Industri Indonesia (Persero) MIND ID, Masa Sidang Ke V Tahun Sidang 2023-2024, Senin 3 Juni 2024.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan,

**Yang terhormat Kawan-kawan Anggota Komisi VI DPR RI,
Yang terhormat Saudara Direktur Utama PT Mineral Industri Indonesia,
Mas Hendi Prio Santoso beserta jajaran *Subholding*-nya,**

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu wa taala*, Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan Rapat Dengar Pendapat PT MIND ID pada hari ini tentunya dalam keadaan sehat *walafiat*.

Bapak-Ibu dan hadirin yang saya muliakan,

Menurut laporan Sekretariat Komisi VI, rapat dengar pendapat hari ini jumlah fraksi 6, anggota 12, izin 2. Saya sudah bisa membuka rapat hari ini, untuk mengambil keputusan rapat, nanti kita sambil jalan, untuk kuorum pengambilan keputusan. Maka, perkenankanlah saya untuk membuka rapat hari ini, yang mana rapat hari ini adalah keinginan kita untuk melihat lebih dalam berbagai hal yang terkait dengan BUMN khususnya MIND ID, sebagai pengelola sebagian dari sumber daya alam kita yang kita harapkan, rakyat, negara akan mendapatkan berbagai hal untuk kemakmuran rakyat. Dan dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, rapat saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.



Bisa disetujui, ya?

(RAPAT: SETUJU)
(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.42 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)

Saya juga minta persetujuan, untuk rapat hari ini kita akan selesaikan maksimal pukul 13, kalau memang kurang nanti kita perpanjang.

(RAPAT: SETUJU)

Sekali lagi, terima kasih kami ucapkan kepada Direktur Utama MIND ID atas ketersediaan waktunya untuk menghadiri rapat dengar pendapat pada hari ini. Sesuai dengan undangan yang kami sampaikan, agenda rapat hari ini untuk membahas tentang evaluasi kinerja korporasi tahun 2023 dan tentunya dan yang lain-lainnya.

Industri pertambangan merupakan salah satu sektor penting di negeri ini, selain karena pendapatan negara yang didapat cukup besar, banyak masyarakat juga menggantungkan hajat hidupnya di bidang ini, sehingga negara berperan penting untuk memastikan kelancaran dalam segala proses bisnis di bidang ini.

Seperti diketahui bersama, MIND ID adalah perusahaan induk negara yang bergerak di bidang ini. Pertemuan merupakan, pertemuan hari ini merupakan kesempatan yang sangat penting untuk kita dapat mengevaluasi kinerja MIND ID selama setahun terakhir, sehingga perusahaan yang berperan strategis dalam industri pertambangan Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional, sehingga berkelanjutan, juga menjaga berkelanjutan lingkungan, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Tahun 2023 bukanlah tahun yang mudah, terdapat berbagai tantangan yang terjadi, baik dalam skala yang domestik maupun global, yang berdampak terhadap keberlangsungan industri di lingkup MIND ID. Salah satu tantangan terberat yang dihadapi adalah kasus-kasus yang menimpa beberapa perusahaan anggota MIND ID. Oleh karena itu, penting bagi jajaran MIND ID untuk dapat memaparkan laporan kinerja korporasinya untuk tahun 2023. Dalam kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan beberapa poin penting yang menjadi perhatian dari kami.

Yang pertama, mengenai transparansi dan akuntabilitas. Diharapkan laporan kerja yang akan disampaikan adalah laporan yang bersifat transparan dan akuntabel. Mengenai pengelolaan lingkungan, kami berharap itu isu global, isu nasional, isu regional, MIND ID bukan hanya berfokus pada hal yang terkait dengan *core* bisnisnya, tetapi juga peduli terhadap lingkungan, sehingga diharapkan MIND ID akan terus berkomitmen pada praktik-praktik

pertambangan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, juga efisiensi dan inovasi.

Era globalisasi seperti sekarang ini, persaingan bukan lagi bersifat lokal melainkan juga bersifat global. Dalam menghadapi persaingan global, efisiensi operasional dan inovasi menjadi kunci utama, dan tentunya industrialisasi atau hilirisasi MIND ID ini sangat penting, karena memacu industrialisasi atau hilirisasi, *sub*-nya adalah hilirisasi, pertambangan nasional mulai dari tembaga, bauksit, hingga nikel, adalah hal yang penting untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia yang, yang saat ini sudah dilakukan oleh MIND ID dan kita mengapresiasi. Namun, hal ini harus terus kita tingkatkan untuk membangun, mengembangkan fasilitas pengelolaan mineral yang terintegrasi, itu penting.

Beberapa negara yang kita kunjungi adalah *integrated industrial* di bidang mineral, itu sangat penting, karena akan memperkecil juga *cost-cost* yang, yang sangat terlihat efisiensi tadi. Perluasan pemasangan produk hilir, *size* yang *semakin* luas, kita kemarin juga ke Italia, mendengarkan betul bagaimana sebenarnya *size* timah yang sedemikian luas, tetapi juga banyak hal kendala harga indeks timah global yang kadang justru memperkecil keuntungan-keuntungan kita. Melakukan alat teknologi adalah suatu hal yang penting, bekerja sama dengan perusahaan *holding* lainnya dalam hal mengintegrasikan rantai pasok. Dari beberapa rapat RDP yang kami dapatkan, kita berharap perlu adanya satu kerja sama antar *holding*, harus terus dilakukan, diharapkan dapat menciptakan berbagai hal, terutama tadi efisiensi dan nilai tambah yang optimal.

Dalam upaya-upaya tersebut, MIND ID diharapkan dapat berkontribusi signifikan dan meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi atau industrialisasi pertambangan di Indonesia. Itu semua nanti bisa dilakukan, baik itu di PT Antam, Freeport, Bukit Asam, Inalum, PT Timah, dan tentunya *sub-holding-sub-holding* lainnya.

Demikian pengantar dari kami, yang kita harapkan nanti akan bisa kita dalami di dalam paparan yang akan disampaikan oleh Pak Dirut. Untuk mempersingkat waktu kami, akan mempersilakan kepada Pak Dirut Utama PT MIND ID untuk dapat menyampaikan paparannya.

Waktu dan tempat, kami persilakan.

DIREKTUR UTAMA PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (HENDI PRIO SANTOSO):

Yang kami hormati dan banggakan Pimpinan dari Komisi VII, eh, sorry, Pimpinan dari Komisi VI, dan Para Anggota dari Komisi VI DPR RI,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,



Izinkan kami *memapari* paparan kami dengan mengulas kinerja korporasi di tahun 2023. Kami juga mohon izin, Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota Komisi VI yang kami hormati, untuk kelengkapan dari paparan kami, kami sudah menghadirkan para direksi dari anggota *holding* pertambangan kami, lengkap, ada dari Bukit Asam, dari Aneka Tambang, dari Freeport Indonesia, dari Inalum, dan juga dari Timah, sudah lengkap hadir pada hari ini.

Izinkan kami mulai, Pak, paparan dari kami. Hanya untuk mengingatkan pada Pimpinan dan Anggota, para anggota yang tergabung dalam PT Mineral Industri Indonesia, kami mulai dari yang paling atas:

- PT Bukit Asam Tbk, yang merupakan produsen batu bara nomor enam terbesar di Indonesia dengan cadangan sumber daya yang terbesar juga di Indonesia.
- Kemudian di sebelah kiri ada Aneka Tambang, yang merupakan produsen nikel terbesar keempat secara global dan juga produsen feronikel terbesar nomor empat di Indonesia.
- Kemudian ada Freeport Indonesia, yang merupakan perusahaan tambang emas nomor satu di dunia dan nomor tiga tambang tembaga terbesar di dunia.
- Kemudian ada MIND ID Trading, yang merupakan *trading arm* kami yang berfokus untuk penjualan dan pemasaran komoditas di luar Indonesia.
- Kemudian ada IPMM, yang juga memiliki saham di Freeport Indonesia.
- Kemudian, kami juga memiliki 20% saham di Vale Indonesia yang *Insha Allah* akan kami tingkatkan kepemilikannya menjadi 34%. *Insha Allah* nanti akan kami implementasikan rencana tersebut di periode Juni-Juli 2024 ini. Vale merupakan perusahaan nikel matte satu-satunya di Indonesia.
- Kemudian ada Inalum, yang merupakan produsen aluminium satu-satunya di Indonesia, berkapasitas 250.000 kilotonnes per annum, kemudian juga memiliki *green energy* sendiri, yaitu pembangkit berbasis tenaga air sebesar 603 MW.
- Yang terakhir, tentunya PT Timah Tbk, yang merupakan penambang dan produsen *refined tin* terbesar di Indonesia.

Demikian, kira-kira *summary* daripada para anggota *holding* kami.

Izin, kami lanjut ke paparan mengenai kinerja korporasi 2024. Sebagai gambaran, ini merupakan berdasarkan laporan konsolidasian atas seluruh anggota *holding* perseroan. Kami mulai dengan kinerja net profit yang *alhamdulillah* sejak 2021-2023 *compounded average growth rate*-nya 39%, yaitu meningkat dari 14,3% di 2021, meningkat menjadi 22,5% di 2022, dan menjadi 27,5 triliun menurut laporan *audited* di tahun 2023.

Ini juga disertai dengan pencapaian kinerja EBITDA yang sangat baik dengan CAGR 20%, meningkat dari 28,1 triliun di 2021 menjadi 40,3 triliun di 2023. Juga disertai dengan pertumbuhan aset sebesar 12% CAGR 2021-



2023, dengan posisi akhir pencapaian aset tumbuh menjadi 259,2 triliun di tahun 2023. Sedangkan kekayaan berupa *equity* yang ditanamkan, juga meningkat menjadi 129,6 triliun, tumbuh dari 2021 sebesar 87,2 triliun, meningkat dengan CAGR 22%.

Izin, kami lanjut ke ikhtisar kinerja operasi produksi tahun 2023. Berikut adalah komposisi komoditas yang menyumbangkan kontribusi terhadap kinerja grup MIND ID. Kami mulai dengan kinerja batu bara, secara volume menjadi 41,9 juta ton. Kemudian yang kedua adalah nikel, sebesar 13,4 juta ton. Kemudian bauksit, sebesar 2 juta ton. Kemudian aluminium, sebesar 215 ribu ton. Kemudian timah ingot, 15.000 ton. Tembaga sebesar 761 ribu ton. Dan emas dan perak 0,2 juta (200 ribu ton).

Izin, Bapak Pimpinan dan para Anggota yang kami hormati,

Kami lanjut menyampaikan mengenai kontribusi grup MIND ID kepada negara, yang terdiri dari PNBP dan pajak lainnya selain royalti, kemudian royalti, kemudian PPH Badan. Ini meningkat, dari 2021 sebesar 32,6 triliun menjadi 58,18 triliun di 2022. Kami mengalami sedikit penurunan dari, di 2023 mencapai 49,69 triliun, ini dapat kami jelaskan, penurunan tersebut karena turunnya sebagian harga *komoditi* tambang yang ada di dalam grup MIND ID, seperti yang sangat signifikan turunnya adalah *komoditi* batu bara. Kemudian juga hal yang sama juga di timah, juga sedikit turun. Kemudian juga di nikel terutama di feronikel, itu juga penurunannya lumayan signifikan. Sehingga demikianlah kira-kira kontribusi grup MIND ID atas setoran pajak dan setoran PNBP dan royalti sampai dengan 2023.

Lanjut, total kontribusi dividen di tahun 2023 mencapai 7,5 triliun berupa pembayaran setoran dividen interim tahun berjalan sebesar 7,456 triliun, naik dari tahun 2022 sebesar 900 miliar. Dan pada tahun 2021, kami belum diminta menyampaikan dividen kepada negara.

Izin, kami lanjut ke pencapaian grup MIND ID dalam kinerja non finansial. Kami ingin menyampaikan beberapa progres, antara lain:

- Penyelesaian Proyek Aluminium Remelt IAA di Kuala Tanjung, Sumatera Utara.
- Kemudian, kami juga sudah mencapai COD Proyek PLTU Sumsel 8.
- Kemudian, juga di bulan Desember, ekspansi smelter PT Smelting sudah dilakukan oleh Presiden di Gresik, Jawa Timur. Ini sudah menambah kapasitas pengolahan, bertambah dari 1 juta ton menjadi 1,3 juta ton.
- Kemudian, juga di Aneka Tambang sudah melakukan *joint venture strategik* dengan produsen baterai *electric vehicle* terbesar di dunia, yaitu CITL. Sudah *closing* transaksi divestasi di PT SDA.
- Kemudian, juga sudah ada *groundbreaking* di dalam *cold handling facility* Keramasan, yaitu fasilitas untuk mengangkut batu bara melalui kereta api. Sudah dilakukan ekspansi kapasitasnya juga oleh PT Bukit Asam.



- Dan proyek SGAR I di Mempawah, Kalimantan Barat, sudah hampir mencapai penyelesaian, *Insyah Allah* di bulan Juni atau Juli ini kita bisa mencapai, apa namanya, *commissioning* dan dimulainya persiapan produksi di Pabrik Alumina yang berlokasi di Mempawah, Kalimantan Barat. Proyek ini merupakan *joint venture*, kerja sama antara PT Aneka Tambang dan PT Inalum yang berbasis badan hukum bernama PT BAI.

Kemudian, kami ingin menyampaikan beberapa *update* mengenai proyek dan program strategis yang kami lakukan di tahun 2024. Di Aneka Tambang sendiri, penugasan hilirisasi itu kami lakukan dengan implementasi *Project Dragon* yang seperti sudah kami sampaikan tadi, sudah dilakukan *joint venture*, kerja sama dengan produsen baterai terbesar di dunia, CATL, sudah berbentuk badan hukum, PT SDA. Dan progres lanjutnya adalah melakukan persiapan dan *feasibility study* untuk pengembangan smelter RKEF sebagai kelanjutan daripada tahapan proyeknya. Juga masih lanjut dengan pengembangan Proyek EV *Battery* dengan *Project TITAN*. Kemudian juga proyek SGAR BAI, yang kami sampaikan tadi *Insyah Allah* di bulan Juli ini akan mencapai *commissioning*.

Kemudian, di Bukit Asam Tbk yang merupakan pemegang sumber daya batu bara terbesar di Indonesia, namun terkendala dengan keterbatasan infrastruktur pengangkutan batu bara, ini makanya PT Bukit Asam selalu mengembangkan bagaimana meng-*unlock* kendala infrastruktur ini dengan melakukan pengembangan-pengembangan kapasitas angkutan lainnya. Jadi, selain dengan mode kereta api, Persero juga sedang mengembangkan mode melalui jalan tambang sendiri, jalan tambang bekerja sama dengan perusahaan *joint venture* lainnya untuk menambah kapasitas pengangkutan yang sedang dilakukan.

Kemudian, juga Persero fokus untuk melakukan akselerasi pembangunan transmisi 500 kV sebagai bagian dari rencana penyerapan kapasitas PLTU Sumsel 8. Dan sedang mengembangkan bisnis turunan batu bara, berupa *anoda sheet*, *artificial graphite*.

Kemudian, di PT Freeport Indonesia, *downstreaming expansion*. Jadi, dapat kami laporkan bahwa penyelesaian penambahan kapasitas di *existing smelter* PT Smelting sudah, Desember selesai. Kemudian, smelter baru yang terletak di Manyar berkapasitas 1,7 juta ton, juga *Insyah Allah* akan selesai di bulan ini, sehingga akan dimulai periode *commissioning* dan persiapan operasi *ramp up* menuju pengolahan 1,7 juta ton dari mulai bulan Juni ini sampai dengan akhir tahun menuju *full capacity*.

Kemudian, di Inalum juga fokus, ya, untuk memakai bahan baku dari anak perusahaan yang bermitra dengan Antam, yaitu di PT BAI, yang akan memproduksi alumina, rencananya akan dimulai *commissioning*nya di bulan Juli nanti.

Kemudian timah, timah ini kondisinya memprihatinkan sehingga fokus pada saat ini bagi manajemen adalah bagaimana melakukan *recovery*, *restructuring*, dan bagaimana berkontribusi dalam mengusulkan tata niaga dan tata kelola baru, dalam rangka penyehatan seluruh industri. Yang seperti Bapak dan Ibu Anggota dan Pimpinan yang kami hormati ketahui, sekarang dalam proses, apa namanya, penertiban hukum, sehingga memang dibutuhkan adanya totalitas perubahan tata niaga, tata kelola, yang juga mengatur tidak hanya PT Timah Tbk, tetapi keseluruhan industri timah.

Demikian yang dapat kami sampaikan, Bapak dan Ibu Anggota dan Pimpinan Komisi VI yang kami hormati. Izinkan kami sekarang untuk memohon kepada para direksi anggota yang hadir untuk menjelaskan kinerja masing-masing daripada setiap anggota perusahaan yang tergabung dalam MIND ID. Kami mulai dari Pak Jenpino, Freeport Indonesia.

Silakan, Pak Jen.

WAKIL PRESIDEN DIREKTUR PT FREEPORT INDONESIA (JENPINO NGABDI):

Terima kasih, Pak Hendi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi VI, dan
Bapak dan Ibu Anggota Komisi VI DPR RI,**

Nama saya Jenpino Ngabdi, menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Izinkan kami untuk menyampaikan laporan kinerja PT Freeport Indonesia pada tahun 2023.

Silakan, *next slide*. Di tahun 2023, produksi biji harian mencapai 201 ribu ton per hari, sedangkan rencana produksi tahun 2024 diperkirakan akan mencapai 173 ribu ton per hari. Ini sesuai dengan RKAB 2024 yang kami ajukan, apabila PT FI tidak diberikan perpanjangan izin ekspor konsentrat untuk bulan Juni hingga Desember 2024, karena izin ekspor akan berakhir pada akhir Mei 2024 ini. Namun, apabila pemerintah memberikan perpanjangan izin ekspor, maka produksi biji diperkirakan akan mencapai 211 ribu ton per hari. Nah, ini yang berdasarkan revisi RKAB 2024 yang kami sampaikan ke ESDM.

Untuk jumlah konsentrat tembaga yang dihasilkan di tahun 2023 mencapai 34 juta ton, sedangkan rencana produksi di tahun 2024 mencapai 2,8 juta ton ini apabila tanpa izin ekspor, dan diperkirakan mencapai 3,7 juta ton bila ada izin ekspor. Adapun jumlah tembaga yang dihasilkan di tahun 2023 sebesar 1,67 juta *pound*, sedangkan rencana produksi tembaga di



tahun 2024 sebesar 1,4 juta *pound* apabila tanpa izin ekspor, dan akan mencapai 1,7 juta *pound* apabila dengan izin ekspor.

Sedangkan jumlah emas yang dihasilkan pada tahun 2023 sebesar 1,96 juta ons, sedangkan rencana produksi di 2024 sebesar 1,6 juta ons bila tanpa izin ekspor, dan akan mencapai 1,8 juta ons dengan izin ekspor.

Sedangkan jumlah perak yang dihasilkan pada tahun 2023 sebesar 6,1 juta ons, sedangkan rencana produksi perak di tahun 2024 sebesar 5 juta ons bila tanpa izin ekspor, dan akan mencapai 6,4 juta ons dengan izin ekspor. Kami berterima kasih kepada pemerintah, karena telah mempertimbangkan untuk memberikan perpanjangan izin ekspor untuk periode Juni hingga Desember 2024. Kami saat ini sedang menunggu izin ekspor ini untuk diterbitkan.

Sedangkan dari sisi kinerja keuangan, pendapatan PT Freeport Indonesia tahun 2023 mencapai 9,3 miliar US Dolar. Proyeksi pendapatan tahun 2024 sebesar 7,4 miliar US Dolar, ini tanpa izin ekspor, dan apabila diberikan izin ekspor, pendapatan ini akan mencapai 11,5 miliar US Dolar.

Untuk laba bersih di tahun 2023 mencapai 3,2 miliar US Dolar. Proyeksi laba bersih tahun 2024 akan mencapai 2,2 miliar apabila tanpa ekspor, dan akan mencapai 4,2 miliar apabila mendapatkan izin ekspor.

Dari sisi EBITDA atau *Earning Before Pajak Depresiasi dan Amortisasi*, tahun 2023 mencapai 5,8 miliar US Dolar. Proyeksi tahun 2024, EBITDA ini diperkirakan mencapai 4,4 miliar tanpa izin ekspor, dan apabila dengan izin ekspor akan mencapai 7,6 miliar US Dolar.

Berikutnya, halaman berikut, ya, terima kasih. Dari sisi penerimaan negara di tahun 2023, pemerintah menerima sebesar 2,7 miliar US Dolar dalam bentuk pajak, dividen, dan PNPB. Jumlah ini memang lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena turunnya jumlah dividen yang diterima oleh MIND ID sebagai pemegang saham PT FI, yang diakibatkan oleh turunnya kas yang dimiliki oleh PT FI, karena adanya peraturan terkait devisa hasil ekspor atau DHE, di mana sesuai peraturan tersebut, 30% dari hasil ekspor wajib ditempatkan selama 3 bulan di bank dalam negeri. Dan juga adanya peraturan bea keluar yang dikenakan untuk ekspor konsentrat PT FI untuk periode bulan Juli hingga Desember 2023. Untuk RKAB tahun 2024, penerimaan negara diperkirakan sebesar 2,9 miliar US Dolar, ini tanpa izin ekspor. Sedangkan apabila PT FI mendapatkan izin ekspor, penerimaan negara ini akan meningkat sebesar, mencapai 5,6 miliar US Dolar atau ada kenaikan sebesar 2,7 miliar US Dolar.

Halaman berikutnya, *next*, ya, terima kasih. Dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat, PT Freeport Indonesia berkomitmen untuk melakukan investasi sosial secara berkesinambungan. Diperkirakan investasi sosial PT Freeport Indonesia rata-rata mencapai 100 juta dolar per tahun, yang akan berlanjut hingga tahun 2041. Pada tahun 2023, jumlah investasi

sosial PT FI mencapai 122 juta US Dolar, yang mana alokasi terbesar diberikan ke sektor pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat.

Next, untuk proyek strategis, PT Freeport Indonesia dalam rangka mendukung program hilirisasi pemerintah, PT FI saat ini sedang menyelesaikan *project smelter* tembaga yang berada di JIPE, di daerah Manyar, Gresik. PT FI memiliki kewajiban membangun kapasitas *smelter* sebesar 2 juta ton per tahun, yang mana dilakukan dengan ekspansi kapasitas di PT Smelting yang juga berlokasi di Gresik, sebesar 300 ribu ton dan pembangunan *smelter* baru di kawasan JIPE yang berkapasitas 1,7 juta ton.

Ekspansi di PT Smelting ini telah selesai dan sudah beroperasi sejak tahun 2023, sedangkan *smelter* di JIPE ini sudah mencapai tahap akhir pembangunan. Pada akhir Mei 2024, progres kumulatif pembangunan *smelter* di JIPE Manyar ini diproyeksikan akan mencapai di atas 95% dengan biaya total mencapai 3,6 miliar US Dolar. Selain itu, di JIPE akan dibangun juga fasilitas *Precious Metal Refinery* atau PMR untuk mengolah lumpur anoda menjadi emas dan perak murni dengan kapasitas olah lumpur anoda sebesar 6.000 ton per tahun.

Next, tahap penyelesaian *smelter* ini yaitu saat ini sudah masuk tahap *pre-commissioning* dan *commissioning*. Dan diawal Juni ini *smelter* JIPE ditargetkan mulai beroperasi dengan dinyalakannya *smelter furnace*. Dan produksi pertama katoda tembaga diharapkan di bulan Agustus dengan *feed rate concentrate* 50%. *Ramp up* produksi katoda diharapkan akan mencapai *feed rate* 100% pada akhir Desember 2024, sehingga dengan demikian seluruh konsentrat yang dihasilkan PT FI sudah dapat diolah sepenuhnya di *smelter* JIPE dan PT Smelting pada akhir tahun 2024.

Demikian yang dapat kami sampaikan, Pimpinan beserta Bapak-Ibu Anggota Komisi VI DPR RI yang kami hormati.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Pak Dirut, tambahan *dikit*, untuk Freeport, terkait dengan temuan BPK yang menyatakan bahwa pemerintah berpotensi denda kumulatif sekitar 7,77 triliun kepada Freeport karena gagal membangun *smelter* sesuai dengan target, kira-kira respons seperti apa, Pak?

WAKIL PRESIDEN DIREKTUR PT FREEPORT INDONESIA (JENPINO NGABDI):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.



Mengenai perhitungan evaluasi denda administratif, kami senantiasa mengikuti peraturan yang berlaku di ESDM, Bapak Pimpinan. Jadi ...

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kena denda 7,7 triliun karena tidak sesuai dengan target penyelesaian yang kita, yang kita perkirakan.

WAKIL PRESIDEN DIREKTUR PT FREEPORT INDONESIA (JENPINO NGABDI):

Angkanya belum ada konfirmasi, Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oh, belum ada?

WAKIL PRESIDEN DIREKTUR PT FREEPORT INDONESIA (JENPINO NGABDI):

Iya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke, terima kasih.

WAKIL PRESIDEN DIREKTUR PT FREEPORT INDONESIA (JENPINO NGABDI):

Terima kasih.

DIREKTUR UTAMA PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (HENDI PRIO SANTOSO):

Terima kasih, Pak Jenpino. Kami mohon izin, Pak Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota Komisi VI yang kami hormati, untuk dilanjutkan dengan pemaparan dari PT Aneka Tambang.

Silakan, Pak Nico.

DIREKTUR UTAMA PT ANEKA TAMBANG (NICOLAS D. KANTER):

Terima kasih, Pak Hendi.

**Yang kami hormati, kami muliakan Pimpinan Sidang Komisi VI,
Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Anggota Komisi VI yang kami hormati,**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera buat kita semuanya,*



Om swastiastu,
Nama Buddhaya, dan
Salam kebajikan,

Izinkan kami menyampaikan kinerja Antam di tahun 2023. Untuk menyingkat waktu bisa langsung ke halaman 6-nya.

Jadi, di sini lihat pada tahun 2023, Antam mampu mencatatkan kinerja produksi dan penjualan yang positif di tengah tantangan global yang mempengaruhi fluktuasi harga *komoditi*. Kinerja yang positif itu juga tercermin pada capaian produksi biji nikel yang meningkat 56% dan penjualan biji nikel yang meningkat 67% dibandingkan dengan tahun 2022.

Selain itu, kontribusi segmen nikel pada tahun 2023 meningkat 7% jika dibandingkan dengan tahun 2022. Selain itu, Antam juga terkait dengan Bauksit, untuk produksi penjualan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 22% dan 21%. Ya, betul masih di situ *slide*-nya.

Terkait dengan lingkungan, Antam mendapatkan penghargaan PROPER EMAS di dua bisnis unit kita, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Antam juga mendapatkan, memperoleh beberapa penghargaan sepanjang tahun 2023. Kemudian, juga peningkatan kredit *rating* Antam oleh S&P Global Rating yang menjadi BB+, ini *outlook* stabil. Dan tetap berada pada *IDX Leading Index Share*.

Mungkin saya, izinkan saya untuk lanjut ke *slide* nomor 10. Nah, ini masuk ke dalam kinerja korporasi kita. Pada kuartal ke-IV tahun 2023, Antam mencatat nilai penjualan bersih sebesar 41,04 triliun, di mana 86% berasal dari penjualan komoditas di pabrik, di pasar domestik.

Kemudian, produk emas menjadi kontributor terbesar terhadap penjualan Antam dengan proporsi 63% dari total penjualan Antam. Meskipun terjadi penurunan pendapatan *year on year*, laba kotor meningkat sebesar 2% menjadi 6,31 triliun, dan laba operasi meningkat sebesar 22 persen menjadi 3,07 triliun *year on year*. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan biaya operasional yang turun 15% dibandingkan dengan tahun yang lalu. Juga didorong terutama oleh penurunan *cost of good sold* dari pembelian logam mulia untuk perdagangan.

Masuk ke *slide* nomor 11. Nah, di sini, dalam *slide* ini, manajemen lebih efektif di dalam piutang dagang, telah mendukung pertumbuhan profitabilitas Antam pada September tahun 2023. Nah, hal ini juga tercermin dalam posisi arus kas bersih perusahaan yang diperoleh dari aktivitas operasional sebesar 9,209 triliun, yang tumbuh sekitar 106% dibandingkan dengan tahun, periode tahun yang lalu.

Total aset perusahaan pada akhir tahun 2023 mencapai 42,85 triliun, karena utang berbunga perusahaan turun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, setelah perusahaan melakukan pembayaran pokok pada



pinjaman investasi jangka pendek dan jangka panjang. Dengan pencapaian ini, Antam berhasil memperkuat posisi keuangan nilai ekuitas terkonsolidasi Antam pada akhir tahun 2023 sebesar 31,16 triliun.

Kami masuk kepada *slide* nomor 13, kontribusi negara. Sebagai perusahaan BUMN, Antam tentunya selalu berupaya memberikan kontribusi maksimal bagi negara, adapun kontribusi ini berbentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), perpajakan pusat, perpajakan daerah, dan kontribusi daerah. Penerimaan Negara Bukan Pajak pada jenis kontribusi kepada negara (PNBP) mengalami kenaikan, utamanya pada jenis PNBP royalti di komoditas nikel UBPN Polaka, yang sejalan dengan kenaikan tonnase penjualan, yang sebelumnya di tahun 2022 sebesar 621.000 Wet Metric Ton menjadi 2.224.000 Wet Metric Ton pada tahun 2023. Serta kenaikan pada PNBP royalti emas Pongkor, dikarenakan perubahan pangsa pasar Pongkor menjadi penjualan domestik, di mana harga rata-rata adalah 2.000 *troy ounce* sehingga dikenakan bayar tarif royalti emas sebesar 10%.

Perpajakan pusat pada jenis kontribusi negara, perpajakan pusat mengalami penurunan, utamanya pada penurunan pembayaran pajak penghasilan (PPH), karena pada SPT Badan Antam Tahun 2022 berstatus lebih bayar, sehingga Antam tidak perlu melakukan pembayaran PPH Pasal 29 pada Kuartal II 2023, serta Kuartal III posisi Antam PPH Badan Antam adalah lebih bayar sehingga tidak dilakukan pembayaran angsuran PPH 25.

Perpajakan daerah dan kontribusi daerah pada jenis kontribusi negara, perpajakan dan kontribusi daerah mengalami penurunan di tahun 2023, di mana penurunan signifikan terdapat peraturan baru atas kontribusi daerah di Pemda Haltim.

Mungkin saya sambung ke *slide* nomor 15, TJSL. Realisasi Anggaran, Anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tahun 2023, terealisasi sebesar 174 miliar. Adapun implementasi program TJSL telah terlaras dengan arahan Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM, di antaranya adalah pelaksanaan program kolaborasi bersama BUMN, seperti dukungan vaksinasi untuk kelompok rentan misalnya lansia, bakti sosial di Namlea, Provinsi Maluku, bersama-sama dengan MIND ID, safari ramadan BUMN tahun 2023 berupa sembako murah dan bazar UMKM, serta peningkatan jalan sehat dalam rangka HUT kementerian BUMN di beberapa kabupaten di Sulawesi Tenggara.

Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, karena kami juga mengetahui sekali bahwa Antam sekarang lagi masalah dengan, terkait dengan adanya isu-isu terkait dengan pemalsuan emas. Apabila diizinkan, mungkin saya jelaskan sedikit.

Jadi, memang saya juga diingatkan oleh Pak Dirut bahwa selain juga tentunya pemalsuan emas, kami juga mengalami masalah dengan Budi Said, yang waktu di pertemuan FGD yang lalu, sebenarnya kami sudah jelaskan sedikit bahwa yang Budi Said atau mafia Surabaya, itu sebenarnya kita itu



dikalahkan memang sampai di tingkat PK. Namun Budi Said itu tetap mencoba untuk melakukan sita eksekusi dan juga PKPU. *Alhamdulillah*, untuk keduanya itu tertunda, karena kami mengajukan PK II, yang memang keputusannya belum ada. Tetapi Budi Said sekarang berstatus tersangka, sehingga ada proses pidana yang berbeda dengan proses perdata, karena di perdatanya kami *kan* dikalahkan sampai PK, jadi, kami harus tetap menjalankan proses PK II itu sesuai dengan ranah daripada perdata. Tetapi untuk di pidananya, sekarang dengan status tersangka, dan dia juga di dalam praperadilan dikalahkan, dan juga di PKPU juga dikalahkan, sita eksekusi bukan kalah, tetapi tertunda, karena PK II kita masih dalam proses. Dan ini yang kami akan, harus ikuti aturan, agar supaya ada kepastian hukum terkait dengan Budi Said.

Namun, kami harus menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Kejaksaan, yang telah tentunya memutuskan bahwa dalam kasus pidananya, Budi Said itu berstatus tersangka, karena terbukti melakukan tindakan korupsi atau merugikan negara. Jadi, untuk kasus Budi Said, walaupun *trends*-nya ini mengarah ke yang cukup positif, tetapi kami tetap harus menjaga agar supaya proses perdatanya di PK II ini tetap kami bisa dimenangkan. Maaf, maaf, Pak, yang ini, Budi Said ini adalah kasus yang emas di Surabaya. Ya, ya, *crazy rich*, betul, Ibu Rika, iya, betul. Iya, sekarang statusnya masih tersangka dan sudah ditahan, tetapi belum pelimpahan ke pengadilan, masih dalam proses.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang kami hormati,

Nah, terkait dengan pemalsuan emas, ini perlu kami jelaskan bahwa pemalsuan emas yang dikatakan sebesar 109 ton, ini sebenarnya sudah diklarifikasi oleh Kapuspen Kejaksaan. *Alhamdulillah*, kami menjelaskan kepada beliau bahwa ini bukan pemalsuan emas. Karena yang dilihat oleh Kejaksaan adalah emas semua yang diproses di Antam dalam kurun waktu 2010-2021, itu yang di luar daripada emas yang kami hasilkan di Pongkor, itu semua dihitung sebagai, yang diproses, yang di, oleh berita itu dikatakan bahwa emas palsu. Nah, *Alhamdulillah*, dalam penjelasan kami kepada Kapuspen, beliau juga mempertajam. Jadi, di dalam *statement*-nya dikatakan bahwa bukan emas palsu.

Namun, ada beberapa hal yang harus juga kami sampaikan bahwa di dalam proses lebur cap ini, ada *branding* atau *licensing* yang dilihat oleh Kejaksaan, ini merugikan. Jadi, diproses di Antam, tetapi kita tidak membebaskan biaya *licensing* atau *branding*, *brand value*. Jadi, ada cap emas, Pak Dharmadi, jadi memang ada cap emas yang kita berikan, karena *kan* dengan di cap adanya emas, itu juga meningkatkan tentunya nilai jual. Tetapi, kita memang tidak mampu untuk memproses semua emas yang ada di, karena kapasitas daripada logam mulia itu bisa sampai 40-80 ton, padahal Pongkor kita itu sendiri hanya satu ton setahun, walaupun kita bisa produksi dengan terus-menerus secara *sustainability*.

Nah, oleh karena itu, kami harus memproses, dari luar juga, termasuk yang kita impor ataupun emas-emas yang ada di domestik. Nah, inilah yang menjadi sedikit adanya, yang kita harus tentunya, kita harus buat kajian yang komprehensif, sehingga kajian ini bisa mendukung argumentasi kita bahwa emas yang kita proses, memang harus kita proses, karena ini adalah untuk keuntungan daripada Antam sendiri. Kalau dilihat kinerja Antam, kontribusi terbesar *revenue*-nya adalah dari emas. Tetapi emas itu waktu prospektus tahun 1997, itu juga dikatakan bahwa lebur cap adalah salah satu *line of business*. Namun kita memang tidak membuat kajian yang komprehensif karena di tahun 2017 sempat di-*stop*, apa, lebur cap ini, sehingga kajian itu memang tidak pernah kita buat secara komprehensif.

Mudah-mudahan walaupun ini terlambat, tetapi *kan* tidak ada kata-kata terlambat, kita hanya bisa membuat kajian yang juga diterima oleh pihak Kejaksaan, sehingga mereka melihat bahwa kegiatan ini sebenarnya memang ada potensi untuk merugikan, karena seolah-olah kita memproses pihak swasta, apalagi mereka mengakui bahwa emas yang mereka lebur cap di kita itu, asal-muasalnya tidak jelas. Maksudnya bisa saja dari PETI, bisa saja dari beberapa proses swasta yang dianggap bisa ilegal, tetapi *kan* ini memang bisnis yang harus berjalan. Nah, ini yang kita harus bisa jelaskan dengan komprehensif kepada Kejaksaan, bahwa walaupun ini kelihatannya menguntungkan, sebagian daripada apa yang diproses oleh swasta, tetapi tidak semuanya karena ini menguntungkan Antam. Karena *semakin* banyak proses yang kita lebur capkan di logam mulia, ini membuat peningkatan harga produksi atau harga lebur cap itu jadi makin tipis. Jadi, memang buktinya bahwa tidak merugikan yang masih harus kita perdebatkan dan kita mesti jelaskan.

Ini mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang kami hormati.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kerugian negara berapa, Pak?

DIREKTUR UTAMA PT ANEKA TAMBANG (NICOLAS D. KANTER):

Bagaimana?

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kerugian negara, kalau benar *enggak* 109 triliun?

DIREKTUR UTAMA PT ANEKA TAMBANG (NICOLAS D. KANTER):

Nah, itu yang kalau dihitung begitu *kan*, kerugian negara jadi bisa 109 triliun, padahal ini yang kita harus sama-sama kita lakukan kajian bahwa ternyata...

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):



Enggak, apa langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh *Holding* maupun Antam?

DIREKTUR UTAMA PT ANEKA TAMBANG (NICOLAS D. KANTER):

Oleh kami, pertama, tentunya *kan* kami harus *mengclarify dulu* kepada publik. Nah, terus-terang kadang-kadang yang dimuat atau diberitakan oleh media, kalau kita baca dengan teliti, Direktur Penyidikan dari, dari Kejaksaan sebenarnya tidak pernah menyebutkan bahwa adanya emas palsu. Tetapi *kan* kita semua, publik *tuh* membaca emas palsu 109 ton. Kemudian tidak lagi mendengarkan penjelasan dari Direktur Penyidik, karena *title* daripada *headline*-nya adalah emas palsu 109 ton. Jadi, begitu kami menjelaskan bahwa proses kami tidak ada emas yang palsu, di-*plintir* atau di *quote* oleh media, yang membuat mungkin dari, dari pihak Kejaksaan seolah-olah kita menantang bahwa, mengatakan bahwa yang salah ini adalah pihak Kejaksaan. Nah tentunya hal ini yang kita.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Intinya tidak ada emas palsu, Pak, ya?

DIREKTUR UTAMA PT ANEKA TAMBANG (NICOLAS D. KANTER):

Emas palsu tidak ada, Pak. Itu kita semua, emas yang diproses harus melalui proses yang tersertifikasi dan LBMA, London Bullion Metal, itu sangat-sangat rigid di dalam mengaudit kita. Jadi, emas yang diproses di Antam, tidak ada emas palsu. Dan ini, *alhamdulillah*, sudah di-*clarify* oleh Kapuspen, di berita di hari Sabtu, Pak. Jadi, yang memang masih *missing*, Pak, itu Pak Darma, itu memang *brand value*-nya seolah-olah tidak kita *charge*, padahal dalam penghitungan-penghitungan kita, ini juga sudah ada, ada untungnya.

Nah, ini yang harus, mungkin, ya, *enggak* bisa kita memperdebatkan bahwa kita, memperdebatkan bahwa kita sudah hitung dan sudah benar. Ada baiknya kita harus mendapatkan kajian yang apakah itu dari Lemhanas atau dari ITB atau apa, yang membuktikan bahwa apa yang kita lakukan sebenarnya tidak ada yang merugikan. Cuma *kan* kalau kita menjelaskan begini, ditanya oleh media, bisa, bisa salah dan bisa menyinggung pihak yang lain. Oleh karena itu, ya sebaiknya kita harus, tentunya harus duduk dan kita buat kajiannya, dan kita bersama-sama dengan Kejaksaan, *mengidentifikasi*, sebenarnya kerugian kita sebenarnya berapa, *sih?* Dari 2010, Ibu Eva, *sampe* tahun 2021. Jadi, *the hell ten years*. *Kan* kalau, bagaimana, Bu, Pak?

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Iya, nanti kita lanjutkan di pendalaman, yang intinya kita melihat ada kekurangan dari sistem bisnis PT Antam, sehingga hal ini bisa terjadi.

DIREKTUR UTAMA PT ANEKA TAMBANG (NICOLAS D. KANTER):



Pasti kita juga ada kekurangannya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Tadi dikatakan dari 2010 sampai 2021. Sepuluh tahun.

DIREKTUR UTAMA PT ANEKA TAMBANG (NICOLAS D. KANTER):

Iya, 2021, karena.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Sepuluh tahun.

DIREKTUR UTAMA PT ANEKA TAMBANG (NICOLAS D. KANTER):

Sepuluh tahun, Pak. Dan GM GM-nya yang, GM GM yang empat terakhir tertangkap sebenarnya *kan* sudah juga digeledah, sudah dua kali. Jadi maksud saya, saya bukan bilang bahwa mereka pasti tidak salah, cuma kajian ini diperlukan dari pihak ketiga yang bisa menjelaskan secara runut bahwa tidak ada, bukan tidak ada, tetapi tidak ada kerugian, dan kerugian negara pun kalau ada bukan kerugian yang sifatnya masif seperti yang diberitakan sekarang ini.

Mungkin itu, Bapak Pimpinan, yang bisa kami sampaikan.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Nanti kita lanjutkan ke pendalaman.

DIREKTUR UTAMA PT ANEKA TAMBANG (NICOLAS D. KANTER):

Terima kasih.

DIREKTUR UTAMA PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (HENDI PRIO SANTOSO):

Terima kasih, Pak Nico.

**Bapak dan Ibu Pimpinan, dan
Anggota Komisi VI yang kami hormati,**

Izinkan kami lanjut dengan pemaparan kinerja dari PT Timah Tbk.

Silakan, Pak Dhani.

DIREKTUR UTAMA PT TIMAH TBK (AHMAD DANI VIRSAL):



Baik, terima kasih, Pak Dirut.

**Yang kami hormati Pimpinan Komisi VI, dan
Seluruh Anggota Komisi VI yang terhormat,**

Kami akan memaparkan kinerja korporasi PT Timah tahun 2023, langsung ke *slide* delapan saja, kinerja operasi.

Baik, pada tahun 2023 produksi biji timah mencapai 14.855 ton. Hal ini dibandingkan tahun sebelumnya, turun 26 persen, yang di tahun 2022 produksi bijihnya 20.079 ton. Begitu pula produksi logam timah, sebesar 15.340 metrik ton, turun 23% bila dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 19.825 metrik ton.

Penurunan kinerja produksi berdampak terhadap penjualan logam timah. Pada tahun 2023, volume penjualan logam sebesar 14.385 metrik ton, turun 31 persen dari tahun 2022 yaitu sebesar 20.805 metrik ton.

Secara tahunan, harga rata-rata logam timah *cash settlement* di *London Metal Exchange* pada tahun 2023 turun 16,8% *year on year* menjadi 25.959 per ton, sedangkan harga per tiga bulan turun 16,2% *year on year* menjadi 25.936 per ton. Sejalan dengan penurunan harga logam timah di LME, perolehan harga jual rata-rata logam timah perusahaan pada tahun 2023 tercatat sebesar 26.585 per ton. Harga tersebut turun 16% bila dibandingkan dengan tahun 2022 yang sempat mencapai harga tertinggi, 31.474 US Dolar per ton. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia pada semester pertama tahun 2023 membuat permintaan timah dunia untuk kebutuhan logam industri terus mengalami penurunan. Dan di sisi lain, banyaknya pasokan timah ke gudang *London Metal Exchange* membuat harga logam timah dunia berada di bawah tekanan.

Lanjut, kinerja keuangan di tahun 2023, PT Timah membukukan pendapatan sebetulnya Rp8,4 triliun. Adanya penurunan volume penjualan logam timah sebesar 6.420 metrik ton dan penurunan biaya, eh, penurunan harga jual rata-rata logam timah sebesar 4.891 per metrik ton di tahun 2022, berdampak pada penurunan pendapatan perusahaan sebesar 4,1 triliun atau sebesar 33%.

Ketidakpercayaan volume produksi dan penjualan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, diikuti pula oleh penurunan harga serta struktur biaya yang bersifat *peak* dan semi-variabel, telah menyebabkan perusahaan membukukan kerugian tahun berjalan sebesar Rp449,7 miliar atau turun sebesar 143 persen bila dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan EBITDA sejalan dengan penurunan laba perseroan. EBITDA di tahun 2023 sebesar 684 miliar atau turun 71% bila dibandingkan tahun sebelumnya.



Lanjut, lanjut. Kontribusi perseroan di sektor pajak pada tahun 2023 mencapai 430 miliar lebih besar, eh, lebih rendah sebesar 31% bila dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 625 miliar, karena lebih rendahnya setoran PPN dan setoran PPH di tahun, pasal, PPH 23, seiring dengan menurunnya produksi pada tahun 2023.

Sedangkan kontribusi PT Timah kepada negara, PNBPN, mencapai 888 miliar atau turun 41,6% dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 1,5 triliun. Hal ini disebabkan terutama karena lebih rendahnya kontribusi perpajakan atau PPH Pasal 25 dan royalti serta dividen.

Lanjut. Program CSR PT Timah dengan tentunya mengukur dampak dan risiko atas aktivitas perusahaan dan mempertimbangkan kebutuhan potensi keunggulan dan kearifan lokal, berorientasi kepada keberlangsungan agar terwujudnya kemandirian masyarakat serta fokus pada arah pembangunan berkelanjutan, dengan semangat berkelanjutan usaha atau *business sustainability*, merupakan tujuan dari program TJSL perusahaan. Pada Peraturan Menteri BUMN Nomor 1 MBU/03 Tahun 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN, bentuk komitmen pelaksanaan program TJSL PT Timah diwujudkan melalui berbagai program dan selalu mempersiapkan aspek-aspek yang saling berkaitan.

Program tanggung jawab sosial dan lingkungan sebesar 7,24 miliar. Dan program pengembangan pendanaan utam, usaha mikro dan usaha kecil menengah sebesar 10 miliar. Dan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau PPM sebesar 14,5 miliar. Dan beberapa program CSR perusahaan yang dilakukan secara bersinggungan dan selaras dengan tujuan berkelanjutan.

Lanjut, lanjut, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon arahan dan masukan selanjutnya.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

DIREKTUR UTAMA PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (HENDI PRIO SANTOSO):

Terima kasih, Pak Dani.

Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR yang kami hormati,

Izinkan kami lanjutkan pemaparan, kali ini dari anggota kami yang bergerak di *smelting* aluminium.

Silakan, Bu Devy.



DIREKTUR KEUANGAN PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (DEVY PRADNYA PARAMITA):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,

Yang saya hormati Bapak Pimpinan dan jajaran, dan Anggota Dewan Komisi VI,

Izin untuk memaparkan sedikit *overview* singkat mengenai Inalum. Sebagaimana telah dipahami bersama, Inalum di tahun 2017 menjadi platform pemerintah untuk mengkonsolidasi aset metal dan *mining* di Indonesia, sehingga MIND ID melalui Inalum menjadi *Holding* BUMN pertambangan sampai dengan tahun lalu. Di mana per Maret 2023, MIND ID efektif *split off* dari Inalum dan menjadi Mineral Industri Indonesia dan Inalum kembali fokus menjadi *operating company*. *Operating asset* kami atau smelter aluminium kami berlokasi di Kuala Tanjung, dengan kapasitas per tahun lalu sebesar 250 ribu ton per annum, ditenagai oleh PLTA yang terletak di Paritohan dengan desain *capacity* 600 MW berjarak sekitar 160 km dari *smelter* sehingga *running capacity*-nya sekarang di kisaran 480 MW.

SDM organik kami saat ini berjumlah 1.811 orang, dengan anorganik sebesar 2.088 orang. Total per Februari 2024 jumlah SDM kami adalah 3.900 orang.

Next. Dari kapasitas produksi 250.000 ton per annum, kami memproduksi 3 macam produk. Satu, adalah aluminium ingot dengan kapasitas 175.000 ton per annum. Kemudian alloy sebesar 45 ribu ton per annum. Dan billet sebesar 30 ribu ton per annum. Tahun ini, kami mentargetkan *increase capacity* sampai dengan 275 ribu ton per annum, dan kami harapkan dengan berbagai inisiatif di *operational excellence, pod optimization, dan pod upgrade*, volume bisa kami optimalkan sampai dengan 300 ribu ton per annum.

Next, berikut adalah kinerja operasional Inalum 2021-2023. Produksi pada tahun 2023 sebesar 214.883 metrik ton adalah lebih rendah sebesar 4% dari tahun 2022, yaitu sebesar 223.774 metrik ton, dikarenakan pelaksanaan dari proyek *pot upgrading*. Penjualan pada tahun 2023 sebesar 220.087 metrik ton, lebih rendah 7% dari tahun sebelumnya, mengikuti penurunan produksi. Sehingga, kinerja keuangan perusahaan pada tahun 2023 memang lebih rendah dari tahun 2022, utamanya karena penurunan harga LMI sebesar 19% dan itu juga karena terjadi *commodity super cycle* yang menyebabkan harga aluminium melonjak sangat tinggi di tahun 2021 dan 2022. Sebagai *update, market share* kami di tahun 2023 sudah mencapai 44%.

Next. Selanjutnya, sebagaimana disampaikan sebelumnya di paparan mengenai kinerja operasional, penurunan volume produksi dan harga LMI terefleksi kepada kinerja keuangan kami, dapat dilihat bagaimana *revenue* di



tahun 2023 menurun, sehingga hanya mencapai 8,3 triliun, sedangkan net *income* 1,3 triliun dan EBITDA 1,9 triliun.

Next. Berikut adalah kontribusi Inalum kepada negara dalam bentuk pajak pusat sebesar 779 miliar di tahun 2023. Dalam bentuk pajak daerah sebesar 149 miliar di tahun 2023. Dan kemudian PNBPN, yang ini adalah biaya masuk dan juga penggunaan perairan melalui biaya KSOP sebesar 69 miliar.

Next. Berikut adalah realisasi anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk tahun 2023. Realisasi sedikit lebih tinggi dibandingkan rencana kerja dan anggaran kami sebesar 9 miliar. Realisasi sebesar 9.121.793.849, di mana untuk pendidikan sebesar 1,7, pengembangan UMK 666 juta, lingkungan 1,1, penyaluran PUMK melalui kerja sama BRI 1,1, dan sosial budaya 5,5.

Program TJSL unggulan ini kami lakukan dalam tiga pilar, yaitu pertama dalam pendidikan, dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mutu pendidikan sekitar wilayah operasional perusahaan, melalui pemberian beasiswa pendidikan dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi, pelatihan dan sertifikasi guru, pelatihan masyarakat, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.

Dalam bentuk program lingkungan, tanggung jawab Inalum kepada lingkungan, khususnya di sekitar Danau Toba dan Pesisir Pantai Batu Bara, diwujudkan melalui penanaman pohon, pembibitan *mangrove* dan pengembangan produk turunannya, konservasi burung air bermigrasi, pemberdayaan petani, serta peningkatan sarana dan prasarana kebersihan lingkungan yang juga bekerja sama dengan pemerintah serta LSM sekitar.

Satu lagi adalah dengan pengembangan UMK, pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil telah dilaksanakan mulai tahun 2016, melalui pinjaman modal usaha atau program kemitraan, bantuan peralatan usaha, pelatihan dan pendampingan, sertifikasi, serta pemasaran melalui pojok UKM di kantor utama Inalum, juga rumah BUMN di Toba, Samosir, dan Humbang Hasundutan.

Demikian yang dapat kami sampaikan, kami mohon arahan dan masukan dari Pimpinan dan Anggota Dewan.

Terima kasih.

DIREKTUR UTAMA PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (HENDI PRIO SANTOSO):

Terima kasih, Bu Devy.

Bapak dan Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR yang kami hormati,



Izinkan kami lanjut dengan pemaparan dari PT Bukit Asam Tbk. Silakan, Pak Arsal.

DIREKTUR UTAMA PT BUKIT ASAM (ARSAL ISMAIL):

Baik, terima kasih, Mas Hendi.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Bapak Pimpinan Rapat Komisi VI DPR RI yang saya banggakan,
Para Anggota Bapak-Ibu Dewan Komisi VI DPR RI,**

Izinkan saya menyampaikan materi *performance highlight* 2023 untuk PT Bukit Asam.

Lanjut, next *slide*, langsung *slide* 6 saja. Untuk menyingkat waktu, kami menyampaikan bahwa total produksi batu bara pada tahun 2023, ini tercatat sebesar 41,94 juta ton, meningkat 12,94% dibandingkan tahun 2022. Begitu juga untuk volume angkutan batu bara, juga mengalami peningkatan, di tahun 2023 total volume angkutan batu bara tercatat mencapai 32,42 juta ton, meningkat 13% dibandingkan dengan tahun 2022. Sementara itu, dari sisi volume penjualan batu bara sepanjang tahun 2023, perusahaan telah mencatatkan penjualan batu bara dengan total volume sebesar 36,97 juta ton, naik 17% dibandingkan dengan tahun 2022.

Untuk kinerja laba rugi, kami sampaikan bahwa sepanjang tahun 2023, perusahaan membukukan pendapatan sebesar Rp38,49 triliun, ini mengalami penurunan sebesar 4,16 triliun atau 9,75% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp42,65 triliun. Penurunan pendapatan tersebut, ya, seiring dengan melemahnya harga batu bara dunia, ya, yang menjadi faktor utama yang mendorong penurunan kinerja pendapatan di tahun 2023.

Untuk laba tahun berjalan, di tahun 2023 yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas Indo, ini tercatat sebesar Rp6,11 triliun. Ini mengalami penurunan sekitar Rp6,46 triliun atau 51,42 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp12,57 triliun. Secara rasio, laba bersih terhadap pendapatan usaha tahun 2023 adalah sebesar 15,86%, ini menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar 29,47%.

Next, untuk dari sisi aset dan *liabilities* dan *equity* perusahaan, kami sampaikan bahwa aset perusahaan per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp38,77 triliun, jadi, mengalami penurunan sebesar 6,59 triliun atau 14,54 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp45,36 triliun.

Dari sisi liabilitas, perusahaan per 31 Desember 2023 ini tercatat sebesar 17,20 triliun, ini meningkat 0,76 triliun atau 4,61% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 16,44 triliun.



Posisi keuangan, konsolidasian Bukit Asam Tahun 2023 masih berada posisi yang baik, kendati secara umum mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Perseroan mencatat penurunan aset sebesar 14,54%, peningkatan liabilitas sebesar 4,61%, dan peningkatan ekuitas sebesar 25,43%.

Next, kontribusi PT Bukit Asam kepada negara, dapat kami sampaikan bahwa total penerimaan negara yang telah diberikan PT BA dan total dividen yang telah disetor kepada pemegang saham untuk tahun 2023, penerimaan negaranya yang kami berikan, itu dari penerimaan pajak sebesar 3,4 triliun, dan yang penerimaan nonpajaknya sebesar 4,2 triliun.

Kemudian dari sisi dividen, kami selalu memberikan kontribusi kepada *stakeholder*, selalu mengalami peningkatan. Di tahun 2021 ini 35%, di tahun 2022 sebesar 100 persen atau 7,9 triliun, kemudian di tahun 2023 sebesar 100% atau 12,5 triliun rupiah.

Lanjut, untuk kinerja TJSL, kami sampaikan kepada Bapak-Ibu Anggota Dewan yang kami hormati. Di PT BA, ada empat pilar untuk realisasi kinerja dan program TJSL. Ada pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan, dan pilar hukum dan tata kelola.

Nah, untuk UMK Binaan, itu per Desember, ini kita sudah ada 793 yang terdiri dari swakelola ada 483 UMK, dan yang kerja sama dengan BRI ada 310 UMK.

Kemudian, penyaluran TJSL-nya sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp66,9 miliar. Dan untuk penyaluran program PUMK sampai dengan Desember, ini kami bekerja sama dengan Bank BRI, sebesar 31,6 miliar rupiah. Dan sampai dengan tahun 2023, UMK binaan yang naik kelas ini ada sebesar 240 mitra.

Demikian yang kami sampaikan. Dan saya kembalikan lagi kepada Pak Dirut MIND ID. Terima kasih dan mohon arahan lebih lanjut.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

DIREKTUR UTAMA PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (HENDI PRIO SANTOSO):

Terima kasih, Pak Aarsal.

Kami, dengan demikian sudah menyampaikan semua paparan kinerja dari para anggota yang tergabung dalam MIND ID Grup. Kami ingin menyampaikan, kiranya apakah Bapak-Bapak dan Ibu Anggota Komisi VI DPR yang kami hormati ingin menyampaikan pertanyaan atau tambahan penjelasan, kiranya kami mohon arahan.

Terima kasih, Pak Aria.



KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih, Bapak Dirut MIND ID.

Selanjutnya, kita akan masuk ke pendalaman dari Kawan-kawan Anggota Komisi VI maupun beberapa dari Pimpinan. Yang sudah memasukkan daftar untuk pendalaman, dari sebelah kanan Pak Subardi, Mbak Rieke Diah Pitaloka, Mbak Mulan Jameela, Pak Jon Erizal. Kemudian sebelah kiri, Pak Herman Khaeron, Ibu Nevi, dan Pak Husni, kalau ada tambahan?

Oke, kami persilakan ke sebelah kiri, Pak Herman Khaeron.

F-PD (Dr. Ir. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Terima kasih.

**Pak Bimo dan Anggota Komisi VI yang saya hormati,
Para direksi, utamanya dari *Holding MIND ID*, Pak Hendi Prio Santoso
dan seluruh Direksi, serta
Para direksi *Subholding*,**

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Pertama, saya ingin mendapatkan penjelasan *dulu*, Pak Bimo. Ini *kan* banyak sekali dirut-dirut tidak hadir pada rapat hari ini. Sepemahaman saya, DPR ini memiliki fungsi pengawasan tertinggi dari sistem pengawasan lainnya yang diatur di dalam konstitusi. Oleh karenanya, semestinya, ya, ada alasan yang kuatlah kalau tidak menghadiri terhadap acara rapat ini. Oleh karenanya, Pak Hendi, saya minta nanti dijelaskan para direksi yang tidak hadir, dan tentu saya memberikan penghargaan kepada para direksi, para dirut, para direktur utama yang hadir pada hari ini.

Yang kedua, saya ingin memulai dari di Undang-Undang Dasar. Bahwa di Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 disebutkan, di Pasal 2, "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara". Kemudian di ayat (3)-nya, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Inilah sebetulnya dua aspek yang harus dilakukan oleh negara, dalam hal ini pendelegasiannya kepada Badan Urusan, Badan Usaha Milik Negara.

Oleh karenanya, saya kira ini yang harus dipedomani dalam kerangka bekerja di BUMN. Ya, konteksnya adalah menggali potensi sumber daya alam, memanfaatkannya, kemudian bisa berkontribusi kepada bangsa dan negara. Kuat sekali, bahwa aturan BUMN untuk bisa menguasai terhadap hajat hidup masyarakat ini atau sumber daya alam Indonesia ini kuat sekali,



karena betul-betul mendapatkan amanah yang kuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Namun demikian, tentu di usaha pertambangan itu sangat menggoda, ya. Dan walaupun banyak kasus yang kemudian pada akhirnya ini terjadi, inilah bentuk yang menurut saya harus, ya, dicarikan jalan, cara, bagaimana? Pak Hendi sebagai Direktur Utama *Holding Grup*, ya, semestinya mencarikan cara, bagaimana mencegah terhadap kasus-kasus yang terjadi sebelumnya. Kita memang tidak perlu terlalu jauh mundur *lah*, justru yang harus dilakukan bagaimana ke depan, bahwa MIND ID yang dibentuk di dalam periode ini, mampu untuk bisa mengkonsolidasikan seluruh *subholding* di sektor pertambangan, dan meningkatkan *performance* korporasinya serta pada akhirnya, memberikan kontribusi dalam bentuk dividen.

Oleh karena itu, saya ingin mendapatkan penjelasan, sejauh mana apa yang dilakukan oleh Direktur Utama dan jajarannya di MIND ID untuk mencegah terhadap kasus-kasus yang saat ini tentu menjadi, publik juga menanggapinya dengan sinis, terhadap sektor pertambangan yang dikelola oleh BUMN. Saya kasih contoh, misalkan kasus hilangnya *opportunity* 300 triliun atau kasus korupsi 300 triliun di PT Timah yang sedang kami alami di panja.

Kemudian terakhir. Saya juga agak aneh, kalau tadi Pak Nico menjelaskan, sesungguhnya terhadap produksi emas swasta yang dikelola di Antam, itu tidak ada persoalan. Jadi, ini mana yang salah, mana yang benar begitu, ya. Karena Kejaksaan menetapkan 6 orang tersangka dengan tuduhan bahwa pemalsuan terhadap merek Antam. Pemalsuan, pemalsuan itu berarti apa yang dilakukan dalam produksi itu tidak dilaporkan terhadap pendapatan korporasi. Nah, mungkin, apakah memang ini terjadi atau tidak, begitu? Ya, pada akhirnya rentetannya *kan* kepada pajak, kepada PNPB, kepada pajak-pajak lainnya karena setiap kali perubahan wujud dalam produksi *kan* terkena pajak, begitu. Nah, oleh karenanya, ini yang saya kira harus jelas betul *nih*, Pak Nico, ya.

Tadi saya ada, agak *confused*, begitu, ketika dijelaskan bahwa sesungguhnya ini juga meningkatkan performa perusahaan karena produk, produk emas Antam sendiri *kan* hanya 1 ton per tahun sehingga harus ada emas-emas swasta yang masuk dan dikelola oleh Antam. Nah, bagaimana dengan yang 109 ini, begitu, kalau kemudian Kejaksaan juga telah menetapkan sebagai tersangka. Memang ini sangat bahaya. Bahaya kenapa? Ketika kemudian publik memahami 109 ton emas ini palsu, artinya ini merek Antam ini, anjlok ini, hilang kepercayaan di publik bahwa Antam ini yang sedang bagus-bagusnya, Antam, bukan hanya memproduksi emas batangan dengan nilai tinggi, tetapi bahkan sekarang membuat emas-emas kecil 0,01-0,02 gram, kecil sekali, ini sedang digandrungi oleh masyarakat. Nah, kalau kemudian kasus ini *enggak* bisa terang, *enggak* bisa terbuka apa sesungguhnya yang terjadi, ini yang akan dirugikan adalah bagaimana *value* mereknya Antam ini akan tergerus dan kepercayaan publik terhadap Antam saya kira akan menurun, begitu.



Nah, saya kurang puas tadi penjelasannya, Pak Nico, kurang puas. Artinya masih ambigu, pada sisi lain, seolah-olah bahwa ini diketahui korporasi, kemudian ada yang salah dengan Kejaksaan, seolah-olah begitu. Tetapi, mohon nanti coba dijelaskan duduk perkaranya, walaupun 6 orang tersangka ini ada masalah, masalahnya di mana *sih* dengan 6 orang ini sesungguhnya oleh korporasi? Begitu, *kan*. *Kan* bisa saja, orang memasukkan di luar sistem, tidak diproduksi dalam Antam, dikasih merek Antam. Artinya, ada yang dikeluarkan oleh korporasi, ada yang dikeluarkan oleh 6 orang ini. Berarti *kan* salah ini 6 orang ini, dia mengambil untung atas mereknya Antam itu. Nah, ini yang, yang saya nanti mohon penjelasan lebih detail.

Kalau PT Timah, menurut saya tidak perlu terlalu dalam, karena kita sedang mendalami di Panja Timah, nanti siang akan dibahas kembali. Jadi, tidak perlu terlalu mendalam dalam rapat bersama ini.

Kemudian, saya juga ingin melihat proses hilirisasi. Karena ini *kan* ke depan akan menjadi kekuatan fiskal Indonesia kita. Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih selalu menyampaikan bahwa kekuatan fiskal kita ke depan adalah di hilirisasi, ada 21 komoditas yang akan di hilirisasi. Nah, dalam lingkup yang tentu di dalam lingkup bidangnya MIND ID, yang hari ini hadir semua, apa sesungguhnya nanti yang akan dibuatkan hilirisasi secara tertata? Secara konsep yang tertata? Sehingga betul-betul memasuki, memasuki pemerintahan yang baru, ada *roadmap*, ada *blueprint* yang kemudian menguatkan bahwa peningkatan fiskal yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ini ditopang oleh MIND ID dengan konsepsi yang telah disiapkan pada saat ini, seperti apa, begitu?

Karena kalau tadi, Pak Hendi hanya memperlihatkan bagaimana pembangunan yang sudah dilakukan, misalkan PT Inalum di Kuala Tanjung, kemudian ada smelter di Gresik, kemudian EV baterai, *kan* ini sebetulnya bukan barang baru, menurut saya ini barang lama, begitu, ya. Dan kami sudah berulang kali untuk bisa mendapatkan informasi ini. Di Mempawah misalkan yang punya Inalum dan Antam, ini saya kira sudah berulang kali juga dipresentasikan. Nah, dalam rangka menangkap terhadap program Pak Prabowo ke depan, seperti apa, begitu, sehingga betul-betul *value*-nya dapat kita ambil, begitu.

Nah, saya juga belum mendapatkan penjelasan yang utuh tentang penanganan ilegal *mining*, karena *kan* batas-batas dalam area pertambangan ini *kan* luas, batas-batasnya sangat bersinggungan dengan batas-batas lainnya. Apa *sih* yang dilakukan? Begitu. Apakah dengan digitalisasi? Dalam batas-batas tertentu kami monitor, misalkan melalui citra satelit yang bisa memperlihatkan apakah kawasan pertambangan kami di lingkungan MIND ID ini, apa namanya, terjadi ilegal *mining* atau tidak.

Karena kalau merujuk kepada persoalan yang terjadi di timah, ini *kan* diawali dari ilegal *mining*. Ilegal *mining* yang kemudian dilegalkan melalui



sebuah proses panjang, melalui sebuah proses keluar-masuk, masuk *dulu* ke swasta, masuk lagi kepada PT Timah, PT Timah dikeluarkan lagi, begitu.

Sebetulnya, orang sudah mengerti *kok* apa yang dilakukan. Kejahatan-kejahatan di bidang pertambangan kita juga sudah paham. Cuma *kan* sekarang, apa yang bisa diperbuat oleh MIND ID untuk bisa mengurangi terhadap tingkat kejahatan yang dilakukan, baik oleh oknum maupun barangkali ada kesengajaan dari korporasi, sehingga menguntungkan pihak-pihak tertentu. Ini juga saya mohon penjelasan terkait dengan penanganan ilegal *mining*.

Kemudian, penanganan kerusakan lingkungan, Pak. Ini juga tidak pernah muncul di sini, begitu. Kalau Bapak menggali atau membuka *soil* di kawasan tambang ribuan hektare, apa sesungguhnya yang kemudian dilakukan untuk mereklamasi, untuk merehabilitasi terhadap kerusakan-kerusakan itu, di lingkungan Antam? Bahkan, kalau kita ke Babel, banyak sekali kubangan-kubangan yang saya kira *kok* sepertinya dilakukan pembiaran, padahal dalam proposal pertambangan biasanya *kan* ada *exit strategy*, begitu. Bagaimana pada waktu nanti terakhir kandungannya sudah habis kemudian direhabilitasi sehingga menjadi kawasan-kawasan yang bermanfaat bagi pembangunan lainnya. Ini juga semestinya diterangkan, begitu.

Jadi, MIND ID bukan hanya menampilkan bagaimana pendapatan hari ini, omzet hari ini, EBITDA, dividen, yang menurut kaca mata dividennya juga terlalu kecil kalau hanya 7,5 triliun, Pak Hendi. Untuk sebuah sektor pertambangan yang sangat besar dan bahkan, publik membandingkan dengan terjadinya korupsi 300 triliun di PT Timah, 7,5 triliun kontribusi kepada negara melalui dividen, itu kecil sekali itu. Dibandingkan dengan Bukit Asam yang memproduksi 41 juta ton batu bara, kontribusi 7,5 triliun, menurut saya kecil sekali. Ini yang coba direvitalisasi *lah*, seperti apa sesungguhnya menggali sumber daya alam yang lebih menguntungkan bagi bangsa dan negara, begitu.

Dari sisi kinerja, selalu saja bahwa kinerja di sektor pertambangan, kami maklumi bahwa memang sangat dipengaruhi oleh harga internasional, oleh harga komoditas internasional, ini pasti fluktuasinya sangat dipengaruhi oleh itu. Nah, sehingga ke depan, mungkin kalau dengan konsep hilirisasi, tidak lagi bahwa kita sangat bergantung terhadap komoditas internasional, karena harga *end product* biasanya lebih stabil dibandingkan dengan harga di hulu, begitu. Harga di hilir biasanya lebih stabil daripada harga di hulu.

Oleh karenanya, tadi kalau bercerita tentang persoalan bagaimana sekarang MIND ID masuk di industri EV *battery* misalkan, apa *sih* yang menjadi kendala ini, begitu? Kalau tadi disebutkan, ini terlalu banyak regulasi yang beririsan, namun tidak terkoordinasi, misalkan. Apa saja *sih* kementerian yang saat ini yang berpengaruh terhadap eksistensi dan pengembangan baterai EV? Nah, kalau misalkan pengaruh baterai EV ini adalah terhadap para pengguna motor listrik atau kendaraan listrik, atau rumah tangga yang

menggunakan baterai, misalkan, alat-alat rumah tangga yang menggunakan baterai. Nah, di mana perlunya Bapak ini keputusan politik di DPR? Kalau misalkan menyampaikan, "Pak, kami ini sulit sekali ada hubungan baik dengan, atau terkonsolidasinya dengan Kementerian Perdagangan", kementerian Perdagangan *kan* mitranya Komisi VI, nah, bisa saja nanti disimpulkan oleh Pak Bimo di sini, bahwa nanti memanggil antara Menteri Perdagangan dengan MIND ID untuk duduk bareng, mengkonsolidasikan atau mengkoordinasikan mana yang sesungguhnya ini menjadi kebijakan yang bisa saling mendukung. Ini penting menurut saya, ini yang harus disampaikan, begitu, bukan hanya persoalan teknis. Kalau persoalan teknis, ini kita biasa saja mendengar, setiap kali pelaksanaan RDP, ya begini, begitu, apa yang disampaikan. Tetapi, tidak ada lompatan-lompatan ke depan yang tentu ini bisa dijadikan sebagai *roadmap* maupun capaian yang lebih prestisius oleh MIND ID ke depan.

Kemudian, penanganan kasus saya kira harus diseriisi, Pak, karena bagaimanapun, meski, ya pasti persoalannya banyak *banget* di pertambangan, banyak *banget*, begitu. Saya pernah kerja di pertambangan, banyak *banget*. Apakah yang bersinggungan dengan masyarakat, apakah yang bersinggungan dengan regulasi, apakah yang bersinggungan dengan institusi lain, ini banyak *banget* sekali. Ini coba diinventarisasi, terus kemudian disampaikan, "Solusinya ini, Pak, tetapi kami tidak bisa menyentuh ini, Pak, karena ini sangat di luar domain kami, bagaimana Komisi atau DPR bisa membantu kami dalam bidang ini", *kan* begitu Pak Hendi, itu enak sekali kalau seperti itu.

Yang terakhir, saya ingin mendapatkan penjelasan, ini supaya saya juga tidak terlalu banyak mencari referensi dari berita, terkait dengan perpanjangan izin operasional Freeport Indonesia. Jadi, saya mohon, biasanya, biasanya, dalam masa transisi, dalam masa transisi pemerintahan ini, biasanya *kan* tidak ada keputusan-keputusan yang, yang strategis dan tentu menyangkut sesuatu yang sangat jangka panjang begitu, ya. Nah, kalau yang jangka-jangka pendek sampai akhir Desember, boleh jadi. Tetapi untuk yang jangka panjang biasanya ini harus ada penjelasanlah, paling tidak, penjelasan, dan kemudian diketahui oleh berbagai pihak dan ini menyangkut proses transisi pemerintahan ke depan. Oleh karenanya, daripada menjadi polemik di publik, di media massa, saya kira lebih baik dijelaskan dengan seterang-terangnya bagaimana proses izin perpanjangan ini dan seperti apa sesungguhnya izin yang diberikan.

Saya kira itu *dulu*, Pak Bimo. Terima kasih waktu dan kesempatannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Eyang Bardi, silakan *monggo*, yang.



F-P. NASDEM (H. SUBARDI, S.H., M.H.):

Baik, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang saya hormati Pimpinan dan segenap Anggota Komisi VI DPR RI, Yang tentunya juga Pak Dirut MIND ID dan Direktur-Direktur yang *Subholding* dari seluruh jajaran yang lengkap hadir pada kesempatan RDP ini,

Ada beberapa hal yang ingin saya dalami. Sebagai wakil rakyat dan kebetulan dari Dapil Yogyakarta, ketika kami berjumpa masyarakat, berdialog dengan masyarakat, mereka masih, apa, masih punya keluhan adalah masyarakat kita belum sejahtera, masyarakat kita masih miskin. Yang dia ungkapkan adalah berasumsi bahwa pengelolaan sumber daya alam, di mana amanah Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat (3), di mana "Bumi dan air dan kekayaan alam sepenuhnya dikuasai oleh negara untuk sepenuhnya kekayaan untuk kesejahteraan masyarakat atau rakyat", itu belum terwujud, belum terwujud. Padahal sejak kita merdeka, seluruh sumber daya alam, baik itu air, mineral, dan yang sudah dikelola, sudah dikuasai oleh negara, tetapi belum terwujud.

Nah, yang terakhir, muncul isu-isu tentang kasus-kasus yang terjadi dengan MIND ID, di MIND ID, antara lain timah yang disebut. Bahkan, Komisi VI sudah membentuk Panja Timah. Kalau kita coba lihat dari kasus timah, itu bukan jangka waktu pendek, bukan waktu pendek, 7 tahun kalau *enggak* salah, ya, saya hitung, kira-kira 7 tahunan *lah*, 7-8 tahun *lah*. Ada pun modus yang dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan sementara oleh Kejaksaan Agung adalah, pertama, kerugian karena kerusakan lingkungan. Yang kedua adalah kemahalan sewa, indikator, indikasinya itu, sewa, sewa *smelter*. Kemudian juga penjualan yang itu, ya, rugi, bisa rugi *lah*, itu antara. Nah, itu terbukti suatu langkah yang sudah dijalankan oleh Kejaksaan Agung maupun dibantu oleh BPKP, nah, berarti sudah konkret, saya menurut. Dan itu ada beberapa tersangka, mungkin sudah 22 orang atau berapa, perkembangan saya *enggak* tahu, belum tahu, belum dengar.

Nah, pertama, saya sampaikan bahwa, apa, memberikan apresiasi *lah* kepada pemerintah melalui Kejaksaan Agung dan BPK yang telah menemukan atau bisa menemukan kasus ini, bisa tidak berkepanjangan, bisa ter, ter, terbuk, apa itu, terungkap, mudah-mudahan ke, diungkap secara detail sehingga ke depannya bukan lagi menjadi masalah.

Nah, yang kami soroti adalah ini adalah suatu upaya yang tidak hanya bisa dilakukan oleh sebuah jemaah kecil, tidak hanya dilakukan oleh kelompok MIND ID. Kalau boleh kami asumsikan dengan jemaah, ya, jemaah salat Jumat, ya, ini tidak hanya salat Jumat, tetapi modus yang dilakukan oleh timah ini adalah jemaah haji, seluruh Indonesia, begitu. Tidak mungkin tidak



ada keterlibatan pihak-pihak penguasa. Tidak mungkin ada ketidakterlibatan dari cabang-cabang kekuasaan yang ada di negeri kita ini. Tidak akan mungkin, ya. Itu yang, yang, apa namanya, saya amati.

Kemudian MIND ID sudah terbentuk lima tahun, dari mulai tahun 2019 sampai hari ini, kira-kira lima tahunlah, lima tahun kurang lebih, ya, empat sampai lima tahun. Pertanyaan saya, Pak, selama lima tahun apa tidak melihat? Selama lima tahun MIND ID sebagai *holding* yang dibentuk untuk memaksimalkan kapasitas daripada unit kerja itu, apa tidak melihat? Apa tidak mencium? Apa tidak mendengar? Apa saja yang dilakukan? Padahal dari jauh hari, tahun-tahun, PT Timah tidak moncer-moncer. Artinya tidak mempunyai suatu kontribusi yang berarti kepada negara, apalagi dalam hal dividen kepada pemerintah. Tetapi apa yang dilakukan, yang sudah dilakukan maksudnya, nanti tolong disampaikan, Pak. Padahal mencium, apa tidak melihat, atau tidak mendengar, apakah ikut jemaah yang, yang perlu di, dipersilakan.

Nah, kemudian soal emas, ya, tadi ini Antam, ya. Memang di berita itu ada 109, tetapi tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur Antam bahwa kalau saya asumsikan emas itu kekurangan, artinya Antam harus mengambil, memproduksi emas dari luar yang ditambang oleh Antam sendiri. Mungkin kalau asumsi saya adalah itu adalah, Antam adalah maklon, mencetak, berarti punya nilai produksi, membayar produksi, *kayak* tebu. Tebu yang *nanam* rakyat, yang punya pabrik adalah PTP. Rakyat adalah memberikan tebu, diolah, kemudian ada bagi hasil.

Nah, tadi dijelaskan, itu sudah ada hitung-hitungannya, tetapi ada satu hal yang tidak diperhatikan, Antam adalah merek. Merek adalah punya hak merek. Pertanyaan saya, apakah ada nilai hak merek ketika memproduksi itu? Kalau maklon, itu tentunya barang yang dicetak itu mereknya adalah milik yang pemilik barang, pemilik produksi, pemilik produksi, jasa produksi tidak, tidak, apa, tidak membikin merek. Tetapi, Antam memproduksi pesanan untuk dimaklon, untuk dicetak, tetapi sekaligus *nempelin* merek, berarti penyalahgunaan adalah menjual merek. Apakah Antam ini memberikan tarif, memberikan *rate* kepada pencetak emas itu terhadap merek itu? Ada berapa? Satu tonnya atau satu kilonya berapa? Ada *enggak*? Dalam penjelasannya tidak ada, mohon nanti penjelasan.

Nah, yang berikutnya, dengan dua kasus ini menjadi satu cermin, menjadi cermin buat Antam, ya, eh, buat MIND ID, karena ada kalau *ndak* salah data di paparan ini, ada data yang ada, ada delapan unit tambang mineral, ya, yang, yang dikelola oleh MIND ID. Ini, apa, baru dua yang muncul, sekarang yang enam, saya berharap bagaimana mengantisipasi jangan sampai terjadi, muncul lagi kasus timah, muncul di lain, ya, kemudian kasus emas, muncul yang lain. Ini adalah sebuah pelajaran yang berarti bagi MIND ID dan bahkan ini yang sangat-sangat diharapkan oleh rakyat Indonesia untuk dia ada peningkatan kesejahteraannya.

Nah, oleh karena itu, bagaimana MIND ID nanti melakukan konsolidasi di *holding*, kemudian setelah konsolidasi tentunya mendata apa yang mesti harus diperbaiki di masing-masing unit *subholding* tersebut, jadi, ada langkah-langkah proaktif ketika dua kasus itu muncul.

Jangan sampai dari dua kasus itu muncul, tahun berikutnya, pemerintahan baru nanti, ada muncul kasus ketiga, kasus keempat, semua *holding* kena kasus. Karena apa tadi? Ini adalah jemaah bukan masjid, tetapi jemaah haji, ya. Kloter ini yang, yang ini, itu kloter, lebih dari kloter itu, ya. Ini yang, yang perlu Pak Dirut sebagai, apa, apa, penanggung jawab *holding*, untuk segera mengantisipasi apa yang telah terjadi ini menjadi pelajaran, dan berikutnya kita bisa jauh lebih baik daripada saat ini.

Itu saja, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Waalaikumsalam,

Selanjutnya, kami persilakan, Ibu Nevi Zuairina.

F-PKS (NEVI ZUAIRINA):

Ya, terima kasih.

**Pimpinan dan Anggota dan Komisi VI yang kami hormati,
Pak Dirut MIND ID bersama *Holding*,**

Pak Dirut, betulnya memang kita sangat prihatin dengan kasus-kasus yang ada, yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, banyak sekali. Dan tentu bagi kami dari PKS, bagaimana pembinaan dan pengawasan MIND ID sebagai induk *holding* PT Timah dan juga *holding* lainnya, kenapa bisa kecolongan dalam kasus ini. Sejauh mana pelaksanaan GCG dalam korporasi. Kami melihat bahwa ini ada kecolongan yang, yang baru kita dapatkan, dan harusnya MIND ID sudah melihatnya, tercium ketika MIND *holding* ini terbentuk, kalau menurut kami.

Dan tentu juga terbongkarnya kasus-kasus yang ada ini, apakah yang dilakukan MIND ID ini untuk memperbaiki? Apakah yang akan dilakukan MIND ID untuk membenahi secara menyeluruh persoalan pertambangan nasional, sampai di mana, Pak, proses membutuhkan satgas terpadu tambang ilegal yang digembor-gemborkan itu? Ya, jadi, tetapi sebetulnya sudah ada satgasnya, tetapi kecolongan lagi, kecolongan lagi, ya. Dan tentu kami juga tidak mau ke depan seperti ini terjadi lagi. Itu yang untuk MIND ID, Pak.

Lalu terus untuk, ada hal yang kami juga ingin sampaikan, yaitu masalah ini, Pak, tentang yang baru-baru ini kita ada dengar, bahwa ada perpanjangan, tadi sampaikan oleh teman kita untuk Freeport, nah, ini bagaimana untuk keberuntungan untuk, apa, dampak positif, ya, dari kebijakan ini terhadap Indonesia. Apakah ini ternyata menjadi hal yang baik atau tidak? Ya, karena perpanjangan ini tentu memiliki maksud.

Lalu yang ke selanjutnya adalah yang terbaru, pemerintah menerbitkan aturan baru yang isinya menyetujui pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus secara prioritas kepada ormas keagamaan yang tertuang dalam PP No. 25. Nah, terus, Pak, bagaimana respons MIND ID secara profesional terhadap kebijakan ini?

Terima kasih, Pimpinan, itu saja.

WAKIL KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih, Bu Nevi.

Selanjutnya, siap-siap Bu Rieke Diah Pitaloka, kameranya disiapkan juga.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan,
Rahayu,*

**Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI,
Yang kami hormati Direktur Utama MIND ID beserta seluruh BUMN yang
berada di bawah naungan *Holding MIND ID,***

Terima kasih untuk pemaparannya.

Pertama-tama, sama seperti dengan teman-teman yang lain, izinkan kami mengingatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 33, ayat (1), "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan."

ayat (2), "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara."



ayat (3), "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat."

Atas dasar amanah konstitusional tersebut, saya kira baik kami sebagai Anggota DPR maupun Bapak dari BUMN, kita rujukannya sama, cita-cita kita sama, adalah bagaimana mewujudkan amanah sekaligus perintah dari konstitusi khususnya Pasal 33.

Bapak-Ibu yang kami hormati,

Yang kedua, izinkan juga kami mengingatkan bahwa BUMN memiliki semboyan yang luar biasa baik, tetapi di sisi lain juga memprihatinkan karena menggunakan jargon agama Islam begitu, ya, paling tidak, yang dengan nama AKHLAK, begitu. AKHLAK, mungkin saya bacakan sedikit supaya kita mengingat bersama. Satu, Amanah, nilai ini berarti dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan berpegang teguh pada nilai moral dan etika. Dalam konteks BUMN, amanah berarti setiap SDM BUMN harus mampu menjaga integritas, melakukan tugas dengan baik, dan selalu berprinsip pada kebenaran. Betul ya, Bapak, ya?

Kedua, Kompeten. Nilai kompeten, mengacu pada kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan bidang kerja. BUMN memerlukan SDM yang kompeten untuk menjalankan operasionalnya dengan efisien. Selain itu, semangat untuk terus belajar dan berkembang merupakan bagian integral dari nilai kompeten ini.

Yang ketiga, Harmonis. Nilai harmonis, menekankan pada kemampuan untuk menjadi hubungan yang baik, saling menghargai, dan bekerja sama dengan semua pihak internal maupun eksternal dengan berbagai pihak termasuk pemerintah, masyarakat, dan mitra bisnis adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama.

Loyal, loyalitas terhadap BUMN adalah salah satu nilai penting dalam AKHLAK BUMN, berarti memiliki rasa cinta, bangga, dan setia terhadap BUMN, serta berkomitmen untuk menjaga kepentingan dan citra BUMN.

Adaptif, mengacu pada kemampuan untuk menyesuaikan diri, perubahan lingkungan, tantangan, dan peluang.

Kolaboratif adalah kunci dalam dunia bisnis, dan nilai kolaboratif dalam akhlak BUMN menunjukkan pentingnya bekerja sama dengan tim, berbagi pengetahuan dan pengalaman serta memberikan kontribusi positif bagi BUMN dan masyarakat secara keseluruhan.

Sebetulnya saya kira tidak perlu saya bacakan sebetulnya, karena saya yakin semua entitas Saudara-saudara di BUMN jauh lebih mengerti dari kami yang berada di DPR, atas asas-asas atau prinsip tersebut. Dan kebetulan Dirut utamanya ini adalah kenalan lama, Pak, ya. Bapak dari PGN,



lalu Semen Indonesia, lalu sekarang ada di MIND ID, biasanya kalau kami menyebutnya empat sekawan, ya, Pak, Pak Hendi, Pak Dilo, Pak Dani, dan Pak Jobi.

Nah, saya kira, saya *enggak* tahu habis ini empat sekawan akan pindah ke mana. Apakah ke PLN? Kalau, apa, terawangan saya barangkali ke PLN atau ke tempat yang lain, tetapi artinya Dirut MIND ID sendiri, Saudara-saudara Pimpinan Anggota Komisi VI DPR RI, adalah orang yang cukup berpengalaman, memiliki jam terbang panjang di tata kelola BUMN. Namun demikian, tentu ada beberapa kasus yang *semakin* hari *kok semakin* menunjukkan adanya kinerja tata kelola yang kurang baik dari pertambangan yang berada di bawah payung MIND ID ini. Oleh karena itu, saya ingin ada beberapa pertanyaan yang cukup penting.

Tadi dikatakan PT Bukit Asam ini adalah memiliki cadangan batu bara terbesar di Indonesia ya, Pak, ya? Kemudian juga yang nikel apa, Pak, tadi, ya? Antam? Antam keempat di dunia cadangan nikelnya, dan feronikelnya juga keempat, ya, luar biasa. Kemudian Freeport Indonesia, emas cadangannya nomor satu di dunia, dan kemudian tembaganya nomor tiga di dunia. Kemudian, juga Inalum ini adalah aluminium terbesar di Indonesia, begitu, dan yang lain-lainnya.

Saya rasa kalau dikelola dengan baik, Pak, dengan prinsip AKHLAK yang ada di BUMN, *enggak* akan kejadian *tuh* kayak begini-begini. Dan kita bisa sama-sama berkomitmen sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Saya ambil contoh kasus yang, bukan kasus, isu. Pertama, mengenai, yang sudah diangkat juga oleh Ibu Nevy tadi sebelumnya mengenai PT Freeport. Dan izin mengingatkan juga sebetulnya pada tahun 2019, Presiden menegaskan kepada jajarannya, bahwa 6 bulan sebelum akhir masa jabatan dilarang untuk mengambil keputusan-keputusan strategis. Tadi sudah disampaikan oleh kawan kami sebelumnya. Dan tentu saja, ada berita beberapa hari lalu, 31 Mei, perpanjangan izin tambang Freeport sampai cadangan habis. Saya tidak tahu ini benar atau tidak. Tetapi inilah forum kita untuk melakukan klarifikasi juga kepada publik. Karena kalau kita lihat misalnya, betul kita sudah, tolong koreksi kalau data saya salah, dari Freeport dan juga dari Pak Hendi. Saham Indonesia per 2018 itu 51,24%, betul, Bapak? Atau 51 persen?

Izin, ya, Pimpinan.

DIREKTUR UTAMA PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (HENDI PRIO SANTOSO):

Izin, interaktif, Pimpinan.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Lima puluh satu?



DIREKTUR UTAMA PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (HENDI PRIO SANTOSO):

Izin, interaktif. Bu Rieke, dapat kami jelaskan kalau 2018 masih belum, Bu. Jadi, kita...

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Dimulainya dari?

DIREKTUR UTAMA PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (HENDI PRIO SANTOSO):

Mulai 51-nya dari tahun 2023. Jadi, sebelumnya masih berupa saham dan ada opsi untuk kontraksi.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Oke, kalau begitu nanti itu bagian yang juga kami minta penjelasannya. Karena selama ini kita berpikir sudah 51%, begitu.

Nah, kemudian, di situ, mohon izin juga nanti, bagaimana kondisi ada sebagai, apa namanya ya, kompensasi dari kepemilikan saham itu, kalau saya tidak salah, harus membayar ke Freeport McMoran sebesar 3,85 miliar US Dolar, yang kabar dari, dari analisis pemberitaan yang kami telusuri, itu akan lunas di 2024 dan itu dibayarkan oleh MIND ID.

Nah, kami tidak mendapatkan penjelasan di dalam forum ini karena ini tentu bagian dari kinerja. Apakah sudah lunas atau belum? Kalau belum lunas, apa kendalanya, Pak? Barangkali itu yang juga bisa kita diskusikan untuk mencari solusi.

Lalu kemudian kalau kita lihat, sebetulnya dari, pendapatan dari Freeport sendiri, dari 2021, 2 miliar US Dolar, kemudian penerimaan negara, ini dari data yang disampaikan, ya, dari data yang disampaikan, 109 juta US Dolar. Tahun 2022, 3 miliar US Dolar, lalu penerimaan negara hanya 122 juta US Dolar. Lalu kemudian 2023 dari 9,3 miliar US Dolar, penerimaan negaranya hanya 2,7. Lalu kemudian di tahun 2024, RKAB pendapatan 7,4 miliar US Dolar, lalu kemudian penerimaan negaranya 2,9 US Dolar. Lalu pendapatan dari Freeport Indonesia, kalau tadi izin kontraknya di, apa, ya, Pak, yang diperpanjang untuk ekspor disetujui, maka ada 11,5 miliar US Dolar pendapatan, tetapi untuk negaranya hanya 5,6 juta US Dolar. Bukan miliar, juta US Dolar.

Nah, oleh karena itu, sebetulnya dari angka, tanpa kita tahu lebih detail bagaimana mekanisme pendapatan itu, tetapi saya kira, angka pendapatan ini juga bukan sesuatu yang fantastis bagi negara, pendapatan negaranya.

Lalu, kemudian kita disodori akan ada perpanjangan izin tambang Freeport sampai cadangan habis. Saya tidak tahu ini bahasa media atau bukan, tetapi saya kira inilah yang nanti perlu jawaban tertulis bagi kami.

Lalu, kemudian, Bapak-Ibu, saya ingin mempertanyakan juga tadi, soal denda yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua, itu juga mohon nanti dijawab dengan tertulis. Tentang timah nanti akan dilanjutkan di Panja, yang kalau saya tidak salah, jam 2 nanti ada Panja Timah. Namun, saya ingin menyoroti titipan dari masyarakat, dari kepala desa dan para pekerja sawit, perusahaan sawit di sekitar perusahaan timah yang bermasalah itu, ya, area timah yang bermasalah. Ada namanya PT Mutiara Hijau Lestari dan CV Mutiara Alam Lestari. Ini adalah perusahaan perkebunan sawit yang tiba-tiba mem-PHK pekerjanya dengan alasan bahwa rekening mereka diblokir termasuk yang terblokir dalam kasus timah. Soal ketenagakerjaannya, tentu saya kira kita semua bersepakat, tidak bisa serta-merta sebuah perusahaan apa pun alasannya mem-PHK tanpa memberikan pesangon dan kewajiban-kewajibannya.

Namun, saya minta kalau boleh, saya tidak mendesak, minta tolong. Kalau kita lihat, Bapak-Ibu, ini ada nilai CSR, saya tidak tahu ini tahun berapa, Perseroan menjalankan tiga CSR untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan total sebesar, ini *kan* kalau kita lihat dengan cadangannya yang luar biasa dari timah dan produksi yang ternyata diproduksi oleh pihak di luar PT Timah besar, Bapak, Bapak, Pak Hendi, coba bayangkan, 31,79 miliar, Pak, ini kalah ini dengan jumlah rekening-rekening yang tersebar yang sedang ramai. Untuk masyarakat sekitarnya, 31,79, terlalu kecil ini, Pimpinan, terlalu kecil nilai CSR-nya. Namun demikian, kami minta tolong, mudah-mudahan dalam kunjungan kita ke sana nanti juga ada solusi untuk, entah CSR dalam bentuk apa, begitu *lah* untuk mereka, kurang lebih ada 600 orang, Pak Hendi, mohon dibantu korban PHK indikasi sepihak dari PT Mutiara Hijau Lestari dan CV Mutiara Alam Lestari.

Yang terakhir, ini terlalu banyak *sih* yang diundang, Pak, kalau boleh lain kali MIND ID dipecah, Pak. Antam di tahun 2023, tadi ada mengenai kasus yang sudah diangkat juga oleh beberapa teman. Dengan kronologis kurang lebih, saya sudah, sudah disampaikan juga oleh Pak Hendi;

- 1 Februari 2024, *General Manager* Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia UBPP LM periode 2017-2019 dengan inisial AH telah ditahan karena terlibat kasus dugaan korupsi penjualan emas sebesar 1,1 ton di Butik Emas Logam Mulia, Surabaya, pada Maret sampai November 2018, yang melibatkan pengusaha Budi Said. Kedua tersangka terlibat transaksi jual beli emas berharga miring di luar mekanisme transaksi PT Antam,
- 29 Mei 2024, Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus Kejagung), Bapak Kuntadi, melalui jumpa pers mengumumkan enam orang saksi ditetapkan menjadi tersangka melakukan aktivitas manufaktur ilegal termasuk kegiatan peleburan, pemurnian, dan pencetakan logam mulia yang tidak



sesuai dengan ketentuan dan aturan PT Antam. Diduga melekatkan logam mulia milik swasta dengan merek logam mulia milik Antam. Logam hasil aktivitas diedarkan ke pasar bersamaan dengan produk logam resmi PT Antam dalam kurun waktu 2010-2021. Logam mulia dengan merek ilegal ini menggerus pasar logam mulia Antam sehingga kerugiannya menjadi berlipat-lipat. Itu dari kejaksaan. Tersangka terdiri dari *General Manager* UBPP LM PT Antam yang menjabat dari 2010-2021, periode 2010-2011, periode 2011-2013, 2013-2017, 2017-2019, 2019-2021, 2021-2022.

- 31 Mei 2024, Sekretaris Perusahaan Antam, Syarif Faisal Alkadrie, melalui laman resmi perusahaan membantah emas milik PT Antam yang beredar adalah palsu dan menegaskan, tadi juga disampaikan oleh Pak Nicolas, seluruh produk PT Antam dilengkapi sertifikat resmi, telah tersertifikasi *London Bullion Market Association*.
- 31 Mei, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspen Kejagung), Ketut Sumedana, mempersilakan PT Antam menempuh upaya hukum terkait perkara ini jika merasa benar.
- 1 Juni 2024 menyatakan pihak Kejagung masih menghitung total kerugian negara seiring perkembangan kasus.

Ini adalah masalah yang cukup besar, Bapak. Tadi, Teman-teman, itu kita bangga *banget* sama Antam. Antam memproduksi emas yang kecil-kecil itu *loh*, Pak, bukan lagi yang besar, yang kecil itu, Pak, itu banyak para pekerja, *nabung*. Daripada Tapera, Pak, orang tadinya *milih nabung* di emas Antam, Pak. Tetapi dengan kejadian ini tentu kami membutuhkan tadi, Pak Nicolas kami mengapresiasi, membutuhkan kronologis dan analisisnya.

Secara garis besar, saya mohon secara tertulis, kepada Bapak Direktur Utama, Bapak Hendi Prio Santoso, mohon diberikan *roadmap*, *roadmap* industri pertambangan BUMN yang berada di bawah MIND ID, Bapak. *roadmap*-nya yang ke depan, sebelum Bapak ini berempat pindah lagi ke tempat lain, Pak. Ini kesempatan untuk bisa memberikan *roadmap* sehingga penerusnya nanti juga tiba-tiba, tidak tiba-tiba memotong keputusan.

Kedua adalah aturan hukum dan aturan alur ini di Antam. Alur lebur, cetak, dan merek di Antam dari hulu, tengah, dan hilir. Perusahaan swasta apa saja yang bermitra dengan Antam, tadi, Pak, yang Bapak sampaikan, mohon kami diberikan informasi.

Yang ketiga adalah kajian lengkap terhadap keputusan perpanjangan kontrak-kontrak Freeport yang tadi. Karena beritanya sepotong-sepotong nanti, Pak Jenpino, nanti kita malah jadi salah, salah mengerti dan digoreng oleh pihak-pihak tertentu. Kami membutuhkan bagaimana sebetulnya alur dari

51%, katanya nanti kalau diperpanjang jadi 61%. Dan sekali lagi Pak Hendi, beneran sudah lunas atau belum itu? Untuk biaya konsesi saham tersebut.

Demikian, terima kasih, mohon maaf kalau terlalu panjang.

*Wallahul muwafiq ila aqwamith thoriq,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Waalaikumsalam,

Pak Husni.

F-P. GERINDRA (H.M. HUSNI, S.E., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi VI dan seluruh jajarannya,
Yang saya hormati Direktur Utama MIND ID, Bapak Hendi Prio dan seluruh jajaran,**

Cukup banyak tadi masukan dari teman-teman. Ini saya coba mulai daripada Ibu Devy, ya, Inalum. Jadi, saya sudah berkunjung ke Inalum, Asahan, kebetulan di dapil saya, Bu, ya, Sumatera Utara. Di sana setahu kami, ada permasalahan turunnya debit air Danau Toba itu, Bu, ya, turunnya debit air Danau Toba. Saya, kira-kira tahun 2023 masih saya di Banggar dengan para penguasa, itu salah satu yang saya bahas tentang penebangan hutan yang ada di sekitar Danau Toba dan perambahan, apa itu keramba-keramba ikan itu, Bu, ya.

Kemarin saya mendapat informasi tentang Inalum bahwa memerlukan daya listrik, yang ada penambahan daya listrik untuk PT Inalum. Kebetulan juga salah satu mitra dari Komisi VI itu adalah PLN, ya, tahu, dan dari Direktur Utama PLN yang ada di Sumatera Utara, katanya Juni atau Juli itu ada penambahan yang dibutuhkan oleh Inalum, *Insya Allah* akan dipasok, ya, *Insya Allah* akan dipasok, itu yang pertama.

Yang kedua, masih dengan Inalum. Ini, Pak Ketua, ada permasalahan Inalum masalah kebutuhan daya listrik yang mereka butuhkan sangat besar, tetapi PLN Sumatera Utara mempunyai daya tersebut, mempunyai dan menyanggupi untuk pemenuhan daya daripada kebutuhan energi oleh PT Inalum itu sendiri. Setahu saya, Ibu, masih terbentur di masalah harga jual daripada PLN tersebut. Mudah-mudahan, ya, Pak Ketua, Komisi VI bisa menjembatani ini supaya Inalum ini terus bisa memproduksi dengan daya saing yang tinggi, karena aluminium ini adalah bahan baku, apa, bahan komoditas



untuk impor. Kemudian, ya, itu saja Bu, ya. Saya sayang sama, sama Inalum, sama daerah saya itu, Bu.

Yang kemudian, ini saya, nanti kita akan panja ini Pak Ahmad Virsal, ya, dengan PT Timah, ya. Saya *dulu*, Pak, di Komisi VIII, hubungan suami-istri itu halal kalau menikah dia. Nah kalau tidak, haram dia. Begitu Ibu Rieke, ya. Kita dulu sama-sama berangkat haji, Bu, ya. Namun, ya, nanti akan kita perdalam pencucian uang itu, Pak. Pencucian uang itu dilakukan pencucian, itu barang hal, barang haram seolah-olah dihalalkan itu, Pak, tetap saja itu haram itu, Pak, ya. Nanti kita perdalamlah, nanti di Panja Timah.

Begitu juga ini, ini apa ini namanya, Bukit Asam. Saya melihat ada yang anomali ini, Pak. Kita tahu ya, Pak, di 2023 itu harga batu bara itu turun, tetapi dari mana Bapak membuat hitung-hitungan harga yang turun tersebut, ya, di sini dituliskan, "jumlah tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat sebesar 6,11 triliun, mengalami penurunan 6 koma, 6,46 triliun atau 51,42% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 12,57 triliun". Apakah penurunan tersebut sama besarnya 50% daripada harga yang turun? Setahu saya tidak, Pak. Tetapi ini bisa saja ini terjadi, efisiensinya yang tidak berjalan baik.

Apalagi visi dan misi, Bapak, menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan. Apakah lingkungannya sudah benar ini, Pak? Yang telah, karena yang namanya tambang, itu sudah pasti lingkungan itu rusak. Apakah dilakukan perbaikan-perbaikan? Ataukah, atau mungkin keuntungan-keuntungan tersebut banyak pada tahun 2023 diberikan kepada perbaikan-perbaikan lingkungan itu sendiri.

Ini sedikit, Pak, mungkin tadi teman-teman banyak menanyakan kepada Pak Nico ini, ya, masalah 109 ton emas. Kalau emasnya itu 1 gram, Pak, ada 109 juta keping, Pak, banyak sekali. Tadi, izin, Pak, apa yang Bapak sampaikan ke kami itu tadi masih, anu ya, masih belum *clear* benar, karena kita tahu, Pak, perusahaan-perusahaan emas ini, ya, di negeri kita itu, Pak Nicolas Kanter, ya tentunya puncaknya itu, apa, paling tinggi itu PT Antam, di bawah itu ada namanya UBS, Pak, ada lagi Galeri 24, Pak, ada lagi Lotus, Pak, ada lagi PMAP, kalau *enggak* salah namanya. Kenapa pihak swasta ini harus datang ke Antam memasang merek Antam? Memang, secara, secara, anu ya, tadi teman-teman saya katakan itu, mungkin tidak ada penipuan kadar, mungkin tidak ada penipuan gramasi, mungkin tidak ada, ya, tetap dia posisinya dalam posisi 99,9%.

Ini saya *enggak* tahu kenapa bisa seorang, apa, Dirut sendiri malah melakukan, apa itu ya, kalau teman saya bilang, maklon, ya. Tetapi biasanya kalau saya misalnya punya pabrik, ya, saya orang kampung *nih* pak, ya, punya pabrik padi *lah*, ya, padi itu diolah jadi beras, mungkin mereka swasta mengolah menjadi, apa, dari padi juga dimasukkan ke pabrik itu dijadikan beras begitu, ya. Tetapi beras itu, ya, beras itu ya pemiliknya ya memasukkan bahan dasar, tidak mengeluarkan merek yang dilaksanakan oleh pabrik yang bersangkutan. Setahu saya aturan mainnya seperti itu.



Ya, kalau saya bilang orang, tetapi izin, anu, Pak, Pak Nicola Kanter, ini kelihatannya Bapak harus lebih kerja keras lagi *nih*, Pak. Kenapa saya katakan seperti itu? Ini sekarang masyarakat sudah resah. Itu di media, media-media sosial sudah ditunjukkan ada emas batangan ini yang, pola yang 109 gram, begitu dia gores, tidak ada tanda emasnya atau tidak ada, apa itu namanya, bungkusnya, ya, kalau Antam *kan* ada bungkusnya.

Karena kita, ya, umumnya masyarakat di Indonesia ini, ya, kita masyarakat-masyarakat pedesaan itu, dia mau naik haji, dia kumpulkan emas, ada standarisasinya, sekian gram, sudah bisa dia berangkat. Dan sekarang juga lagi, anu, lagi mode tabung emas, 10 ribu pun sudah bisa tabung emas. Jadi, tolong Pak, ini kalau tidak disosialisasikan, kepercayaan masyarakat itu bisa turun, kepercayaan masyarakat itu bisa rontok. Kami cinta Antam ini, Pak, karena Antam ini sudah bagus sekali dia punya, anu ya, *branded*-nya, ya, tingkat kepercayaan masyarakat itu sudah sangat luar biasa sekali. Jadi, hal-hal yang seperti ini, ya, tolong, ya mau tidak mau seorang Pak Nikola Kanter itu harus banyak terjun ke lapangan untuk, apa, meredam isu-isu yang kurang baik.

Ini kemudian *nih*, ini PT Freeport. PT Freeport, ya, tentunya, Pak Jenpino, kami melihat bahwa, bahwa, apa, tingkat produksi daripada PT Freeport itu tidak ada yang, yang berkurang, ya, tidak berkurang, ya. Waktu dipegang oleh Freeport Morgan sendiri sekarang dengan saham 51,24 %, ya, *enggak* salah saya, milik Republik, Pemerintah Republik Indonesia, saya lihat kinerjanya juga masih *oke*. Cuma tentunya, tentunya ada permasalahan lingkungan di sana, Pak, ya. Permasalahan itu yang namanya *tailing*, *enggak* salah saya, ya, *tailing*, ya, *tailing*. Itu mudah-mudahan bisa dilakukan peningkatan-peningkatan pembiayaan di permasalahan lingkungan itu sendiri, ya.

Jadi, yang terakhir, tentunya untuk Pak Hendi Prio sendiri selaku Pimpinan dari MIND ID. Apa pun ceritanya, Pak, perusahaan itu akan eksis, apa yang Bapak sampaikan tadi, tentang efisiensi, ya. Kita senang program hilirisasi juga sekarang sudah berjalan baik, ya, Cuma, ya, tolong dilihat tentang, apa, kerusakan lingkungan yang masih juga tinggi. Begitu juga di dalam pengawasan, tentunya Bapak Dirut MIND ID juga tentunya pasti melakukan pengawasan-pengawasan terhadap direktur-direktur pelaksana daripada tambang yang di bawah ke pengawasan Bapak, karena apa yang Teman-teman sampaikan, mudah-mudahan Undang-Undang Dasar kita Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan (3) bisa betul-betul memberikan kemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia.

Saya rasa itu saja dulu, Pimpinan, lebih dan kurang saya mohon dimaafkan.

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*



KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Selanjutnya, Mbak Wulan, *enggak* ada.

Ke Pak Jon.

F-PAN (Dr. H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

**Pimpinan dan Teman-teman Anggota Komisi VI,
Direktur *Holding*, Pak Hendi dan kawan-kawan, serta
Segenap jajaran direksi yang di bawah *Holding* MIND ID,**

Saya melihat tambang ini adalah harapan terbesar bagi kita di Indonesia, Pak Hendi. Kita tahu rencana Pak Prabowo ini ke depan *kan* tumbuh di atas 5 persen. Bisa tumbuh itu di, dipenuhi, tetapi kita juga harus mengurangi dari ketergantungan dari utang. Nah, salah satu potensi yang besar untuk *ngatasi* itu adalah dari tambang kita ini, Pak, jadi, ada di tangan Pak Hendi. Karena apa? Karena sumber penerimaan negara itu kalau tergantung pajak saja, pajak yang *dinaikin*, sekarang *kan* sudah naik *nih*, pasti beban rakyat meningkat.

Kemudian, dari PNBPN juga terbatas. Nah, harapan kita adalah dividen dari BUMN ini yang berperan besar untuk menopang itu semua. Jadi, itu *clear* kita lihat. Nah, Teman-teman sudah membahas banyak hal teknis tadi, ya. Saya ingin menyampaikan langsung ke *holding*, bahwa paparan Pak Hendi ini adalah *given*, sesuatu yang sudah ada tanpa ada *benchmark*. Jadi, hari ini kita turun, tahun lalu sekian, tahun ini sekian.

Nah, maksud saya, Pimpinan, saya berkali-kali menyampaikan kepada BUMN ini agar menyampaikan rencana kerjanya itu ada *short term*, *medium term*, dan *long term* ke kita. Jadi, waktu duduk membahas kinerja seperti ini, ada acuan. *Loh*, tahun lalu, katanya tiga tahun ini akan tumbuh seperti ini. Ini *enggak* ada. Nah, inilah yang saya selalu protes bahwa *kok* bahas triliunan ini cuma beberapa lembar, begitu. *Oke*, beberapa lembar, tetapi masuk kepada konteks yang penting kita bahas.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Izin, Pak Jon, saya perpanjang dulu satu jam, sampai jam dua.

(RAPAT: SETUJU)



F-PAN (Dr. H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.):

Jadi, itu yang poin pentingnya. Mungkin diawali dari MIND ID sebagai *holding* melihat itu semua, satu tahun ke depan, tiga tahun ke depan, lima tahun ke depan seperti apa, sehingga waktu kita duduk kita lihat. Nanti detailnya, *loh* kenapa ini yang turun, baru dijabarkan oleh Pak Hendi. Nah, kalau kita lihat perlu penajaman lagi, kita pilih beberapa BUMN saja, Pimpinan, yang memang kita perlu pendalaman. Kalau sebanyak ini, waktu sudah diperpanjang lagi. Kalau saya *nanya* satu persatu, saya yakin jam 4 *ndak* selesai. Jadi, saya menyampaikan hari ini, tolong hal strategis ini disampaikan. Saya sudah pernah sampaikan juga ke Pak Menteri, bahwa itu ke depan katanya akan dilakukan seperti itu. Tetapi sampai hari ini, ya itu dia, kita hanya dapat, tahun ini rugi sekian atau untung sekian, tahun lalu sekian. *That's all*. Kita *enggak* punya data apa rencananya dan seterusnya.

Jadi, potensi daripada lembaga atau badan-badan usaha di bawah MIND ID ini yang besar, kita tidak tahu. Seperti waktu itu kita melihat juga, apa, Bukit Asam, katanya potensi lahannya besar, masih banyak lagi yang bisa di *explore*, nah, hal ini kita *enggak* tahu kapan mau di *explore*, apa yang dibutuhkan, kebijakan apa yang perlu didukung.

Nah, menurut saya, ke depan ini penting. Saya bicara lebih ke depan karena permasalahan-permasalahan teknis tadi sudah disampaikan oleh teman-teman. Nah, mudah-mudahan Pak Hendi dan teman-teman BUMN yang ada di bawah MIND ID ini bisa melaksanain ke depan, sehingga hasil daripada rapat ini betul-betul bisa saling mengisi. Kami akan bisa bertanya, *loh* yang tahun lalu Anda merencanakan *sejini*, kenapa? "Oh, turun karena ini, karena harga, dan seterusnya. Naik karena ini", dan seterusnya. Jadi, hidup, rapatnya jadi berkualitas.

Demikian, Pimpinan.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih, Pak Jon.

Selanjutnya, Pak Rudi Hartono Bangun.

F-P. NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P.):

Terima kasih, Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota,
Yang saya hormati Dirut MIND ID, Dirut Bukit Asam, Inalum, Timah,
mana lagi, Pak? Dan Pak Antam, Dirut Antam, dan
Seluruh jajaran yang hadir,**



Baik, Pak Hendi. Pertama, karena ini *holding*, saya ingin mempertanyakan dan minta penjelasan Pak Hendi dulu. MIND ID ini *kan holding* atau induk dari perusahaan tambang yang ada di Indonesia, Pak, yang Bapak hadirkan sekarang. Jadi, yang sekarang ingin, pertama saya ingin tanyakan, terkait PT Timah, Pak, yang menjadi anak usaha dan grup *holding*-nya MIND ID. Di mana saat ini timah sudah diaudit, merugikan negara hingga ratusan triliun, bukan miliar, Pak.

Yang saya mau tanya, Pak Hendi, Pak Dirut MIND ID, selaku induk *holding*, sebenarnya mekanisme kinerja *holding* dan anak usaha ini seperti apa, Pak? Teknisnya, juknisnya, petunjuk teknisnya. Dan di mana fungsi *holding* itu, Pak Hendi, dalam memonitor anak usahanya? Kenapa seakan-akan, seakan-akan ini saya lihat, Pak, MIND ID ini dengan kasusnya timah ini seakan-akan diam, tidak ada respons. Jadi, kalau banyak yang bertanya ke saya, jadi apa gunanya itu *holding*, Pak, Pak Rudi? Begitu. Ada yang ingin bertanya, rekan media, apa gunanya mereka *dikoordinir*? *Holding kan ngordinir* itu, Pak, jika anak usaha ini bisa suka-suka jalankan model bisnisnya, begitu, tanpa ada supervisi dari *holding*, dari induknya, begitu. Itu, Pak Hendi, terutama yang ingin saya tanyakan dan banyak yang rekan-rekan media bertanya.

Lalu yang kedua, Pak Hendi. Apakah *holding* ini sebagai induk, induk dari pertambangan usaha, pertambangan ini mendapat setoran pendapatan dari PT Timah? Dan berapa jika ada? Berapa banyak itu per tahun setoran PT Timah itu, Pak Dani itu, ke MIND ID?

Kemudian yang ketiga, Pak. Jika, jikalau *holding* atau induknya ini tidak berperan, kita punya anak, kita sebagai orang tua, tetapi kita tidak ada pengawasan, untuk apa fungsi orang tua, Pak? Fungsi kita *holding*, induk? Nah, jadi harusnya kalau baiknya, ya, dibubarkan saja, Pak, begitu, *enggak* perlu ada induk, *enggak* perlu ada orang tua, *enggak* ada perlu *holding*, *begitu*. Dan diganti atau diganti orang tuanya, Pak, begitu. Jadi, ada pengawasan baru, begitu. Itu Pak, Pak Dirut MIND ID, Pak Hendi, pertama yang ingin saya pertanyakan.

Dan ini paparan Bapak juga mengenai ikhtisar kinerja operasi produksi, saya lihat kurang paham saya, Pak, dengan model gelembung-gelembung merah, gelembung biru, gelembung titik-titik, begitu *kan*, Pak. Dan di ikhtisar kinerja produksi *Group* MIND ID ini, yang terbanyak ini, Pak, Bapak lihat ini warna biru, ini adalah dari Bukit Asam, dia ada sebesar 41,9, persen atau juta ton saya *enggak* tahu ini, Pak. Dan saya lihat yang paling kecil ada emas dan perak, Pak, begitu, cuma 0,2, ini maksudnya angkanya berapa, Pak? Begitu, jadi, *kan* harus jelas juga ini, Pak. Tembaga juga hanya 761, Pak, apa 761 apa ini, Pak, begitu.

Sementara Bapak bilang *Freeport* sendiri yang memproduksi emas memberikan kontribusi, berapa triliun kemarin, Pak? Saya pernah dengar, begitu. Tetapi ini di sini batu bara *loh*, yang Bapak jabarkan kinerja operasional produksi MIND ID *Group*. Nah, jadi, ini, ini saya *pengin*

penjelasan angkanya, Pak, karena Bapak koordinatonya, induknya, dan *holdingnya*.

Kemudian, kontribusinya juga ke negara berupa setoran pajak, setoran PNBP, Pak. Ini *kan* Bapak buat ini hanya kontribusi *Group MIND ID*, warnanya abu-abu, merah, biru, Pak, biru *dongker*, dengan angka hanya 2021, 2022 dan 2023. *Enggak* ada dipaparkan Bukit Asam sekian, *enggak* ada, Pak. Harusnya ada ini, Bapak sebagai orang tua, sebagai induk. Misalnya si Freeport berapa, Bukit Asam, Freeport, Timah, semua ada, Pak. Ini tidak ada, Pak. Nah ini Inalum berapa, juga *enggak* ada. Hanya kontribusinyalah Bapak buat *grand* total saja, begitu. Nah, ini yang saya *pengin* dapat nanti penjelasan dari Pak Hendi sebagai grup, sebagai *holding*.

Kemudian yang kedua, Pak. Ini, Pak Hendi, saya ingin bertanya kepada anaknya, Pak, kepada anaknya, yaitu PT Bukit Asam, begitu. Jadi, saya ingin bertanya tentang laba rugi juga dan kinerja personal Bukit Asam. Ini, Pak, siapa? Pak Dirut, ya? Pak Dirut, Pak Arsal, ya. Itu *kan* ada, Pak, Bapak sampaikan di halaman lima tadi, enam, Bapak langsung baca. Total produksi batu bara 2023, Pak, 41,9 juta ton, Pak, begitu, meningkat 12,9%, ini Bapak yang sampaikan, dibanding 2022. Volume angkutan batu baranya juga meningkat 2023 ini, Pak, jumlahnya 32 juta ton, jadi, *ningkat* 13%, itu bapak sampaikan. Tetapi Pak Arsal, Pak Dirut, di sini total aset per 31 Desember tahun 2023 sebesar 38,7 T, triliun, turun. Turun 6,5 triliun, Pak, Bapak sampaikan di pembukuan Bapak ini, jika dibanding 2022 sebesar 45 T, jadi, sekarang tinggal 38.

Yang saya mau penjelasan juga, Pak Dirut, ya, kenapa produksi 2023 ini meningkat 12,9%, tetapi asetnya turun 14%, begitu? 6,5. Jadi, produksinya *ningkat* 12,9. Kalau dengan produksi total batu bara 41 juta ton dikalikan 12 *kan* ada 4,1 juta, Pak, naiknya. Dikali berapa, Pak, rata-rata harga batu bara? 200 ribu? 300 ribu? Berarti ada uang berapa, 6 triliun juga *kan*, Pak? Nah, tetapi ini harusnya *kan* naik, Pak? Harusnya, atau *enggak* ada aset yang turun, tetapi ini di sini Bapak buat turun 6,5 triliun, begitu. Ini, Pak Arsal, saya ingin penjelasan, berapa harga batu bara saat ini, 2023, dan berapa harga 2022? Nah, jadi dari situ nanti Bapak tahu itu. Ini siapa yang buat *accounting*-nya, hitungannya, begitu. Ada selisih 12,9, *kan* tadi, Pak, saya bilang 12,9% dari 41 juta ton, begitu, Pak. Jadi, kenapa ini? Ini saya *pengin* penjelasan, Pak Dirut.

Kemudian yang kedua, Pak Dirut. Saya ingin tanya model bisnis Bapak ini, Pak Dirut Bukit Asam. Saya mendengar dari rekan-rekan, kawan-kawan, Bapak sudah ada *merubah* model bisnisnya Bukit Asam dari tambang ke hotel. Apakah benar, Pak? Nah, begitu, jadi, saya ada dilihat, *disodorin*, apa, hal, bahwasanya Bukit Asam telah membangun juga hotel, nilainya ratusan miliar di Jakarta ini, di daerah Jakarta Selatan, Duren Tiga, begitu. Dan Bapak ada membangun hotel dan apartemen. Nah, jadi, saya ingin bertanya, apakah sudah *dirubah* model bisnisnya Bukit Asam dari tambang ke jasa perhotelan seperti Patrajasa itu? Ini Pak Dirut Bukit Asam yang ingin saya tanyakan, begitu. Mohon penjelasannya itu Pak, begitu.



Kemudian yang ketiga *lah*, yang terakhir ini tentang Antam, Pak. Pak Dirut Antam, Pak Nico. Jadi, tadi sudah teman-teman jelaskan panjang lebar, saya hanya ingin bertanya begini, Pak. Terkait masalah emas Antam yang di tingkat, masalah yang ditingkat GM-GM, yang katanya perihalnya memberikan diskon versi mereka sendiri, ya *kan*, yang tadi dibahas di Surabaya itu, memberikan diskon-diskon dengan harga yang lebih murah sehingga akhirnya Antam dituntut balik, begitu *kan*, Pak.

Tetapi yang saya, saya ingin tanya, Pak, ini apakah manajemennya Antam di Jakarta sebelum Pak Nico, apa tidak tahu dirut yang lama, begitu. Atau jangan-jangan sudah tahu, pura-pura tidak tahu, begitu. Mana berani, Pak, sekelas GM, kepala toko memberikan diskon nilainya lebih ton-tonan emasnya, Pak, begitu. Coba Bapak, jadi, jadi jangan akhirnya lingkaran setan. Yang dirut baru, manajemen baru, kita *ngurusin* di pengadilan, Pak. Kasasi lagi, sudah banding, apa, pengadilan negeri, kalah, Bapak kasasi. Nah, sekarang *enggak* tahu nasibnya bagaimana, *kan* itu main-mainan akhirnya, Pak, begitu. Dan apakah dirut yang lama sudah dipertanyakan oleh Kejaksaan, begitu? Nah, itu, Pak Nico.

Dan yang kedua tentang juga pemalsuan cap, tadi yang dilakukan GM-GM tadi, katanya diperiksa Jaksa. Apakah ini juga cap kadar Antam itu bukan persetujuan sekelas Bapak, jabatannya, begitu? Kalau sekelas hanya kepala cabang, kepala kantor, apa berani, Pak, nekat begitu, Pak, begitu? sampai 100 ton dikeluarkan begitu, kalau tadi *dirinci* ada jutaan emas-emas yang dijual di toko *kan*, Pak. Nah, jadi, ini tolong dijelaskan, Pak, Pak Nico. Jadi jangan di sini ataupun kita pura-pura *enggak* tahu, padahal sudah paham, ya, *kan*. Ini mohon penjelasan dan mohon keseriusan Bapak-Bapak, begitu. Itu saya pikir, Pak, Pak Dirut, mohon penjelasan.

Saya kembalikan ke Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Selanjutnya, Pak I Nyoman Parta.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

**Pimpinan beserta seluruh Bapak-Ibu Anggota Dewan,
Pimpinan *Holding* dan seluruh perusahaan tambang yang hadir,**

Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, Pak Nico, coba diperjelas lagi tentang emas palsu atau sertifikat palsu atau logo palsu yang 109 ton itu, karena di lapangan mulai muncul di medsos, di TikTik yang ke mana-mana ininya, ini tolong di, dibuat lebih jelas lagi, itu satu.

Yang kedua untuk MIND ID, Pak Hendi, saya coba tadi cari di Google tentang lebih, tentang Pak Hendi, ternyata yang muncul empat kontroversial Hendi Satrio. Jadi, yang muncul itu bukan prestasinya, diberikan pengantar oleh medianya, tetapi empat kontroversialnya.

Satu, tidak *nyetor* LHKPN. Yang kedua, itu menjadikan diri sendiri komisaris di BUMN yang lain. Yang ketiga, menjadi bagian dari pengusulan perpanjangan Freeport. Yang keempat, agak lama disebutkan *nguruskan* BLBI. Ini selintas saja tentang Pak Hendi yang saya klik tadi.

Namun, saya ingin tanya, Pak Hendi, di dalam MIND ID, keuntungan yang ditarget sekarang 7,4, 7,4 triliun. Target 2024 berapa? Biar kita punya catatan di dalam forum ini. Karena sesungguhnya 7,5 triliun dengan mengelola sekian perusahaan tambang, ini sangat kecil. Apalagi, dengan isu penyimpangan yang terjadi di PT Timah saja misalnya 271 triliun, bahkan terakhir disebutkan 300 triliun, jadi, dengan keuntungan hanya 7,4 T, itu sangat-sangat kecil, sehingga kita butuh target ke depan, Pak Hendi, berapa targetnya.

Yang terakhir, Pak Nico, saya ingin tanya mungkin juga sekaligus nanti dikonfirmasi oleh Pak Hendi. Ada komisaris PT Antam yang bernama Dilo Seno Widagdo, iya, Pak Dilo, ya? Bapak disebut berulang-ulang di dalam media jadi calon tersangka, apa sudah jadi tersangka, Pak? Ya, sangat penting *nanya* ini karena begitu gampang *nyebutnya*, baru klik Dilo, langsung muncul. Di samping di PT Antam, Bapak juga jadi Direktur di Portofolio MIND ID, ini coba dijelaskan, Pak, nanti.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Selanjutnya, Pak Husein.

F-P.GERINDRA (MUHAMMAD HUSEIN FADLULLOH, B.Bus., M.M., M.B.A.):

Terima kasih Mas Bimo, Pimpinan Rapat pada siang hari ini.

**Teman-teman Anggota Komisi VI yang saya hormati,
Pak Hendi, Dirut *Holding* dan juga beberapa Dirut dan Direksi yang hadir dari *subholding* dari PT MIND ID,**

Tadi banyak sekali paparan-paparan yang sudah dipaparkan oleh Teman-teman. Namun, ada beberapa hal yang tentunya ini juga harus menjadi *concern* dan juga harus kita bahas ataupun kita sampaikan pada siang hari ini.



Ya, tadi di awal memang kita membahas banyak isu, ya, banyak isu masalah-masalah hukum yang juga sudah disebutkan oleh teman-teman, yang di mana itu juga menjadi *concern* kami bahwasanya masalah hukum ini ternyata secara kinerja perusahaan itu tentunya akan berdampak. Dan tadi sudah dipaparkan juga, kinerja ataupun laporan-laporan keuangan dari seluruh yang hadir di siang hari ini, yang tentunya itu membuat kami juga berpikir bahwa sebetulnya ada potensi keuntungan yang bisa didapat lebih besar lagi, ya, oleh MIND ID beserta *subholding* yang hadir pada siang hari ini. Jadi, dikarenakan ada masalah-masalah ini, bukan berarti ini juga menjadi hal yang, apa namanya, tidak baik, tetapi ini menjadi pembelajaran, menjadi catatan-catatan, bagaimana sebetulnya potensi kita ini masih, potensi MIND ID ini untuk menghasilkan keuntungan dan juga memberikan kembali kepada negara, kepada masyarakat. Ini tentunya bisa lebih besar dengan catatan kalau dilakukan perbaikan-perbaikan dari kejadian-kejadian yang telah terjadi, ya, selama ini, ya.

Jadi, saya rasa ini laporan kinerja keuangan ini bisa lebih baik lagi kalau memang ada perbaikan, betul ada perbaikan. Kita sudah hampir satu periode, ya, mau selesai, tetapi ternyata di akhir-akhir ini mulai muncul. Jadi, ini banyak tanda tanya dan juga selain tanda tanya, ini tentunya menjadi harapan bahwa kita bisa lebih baik lagi, bisa memberikan kontribusi lebih besar lagi kepada negara.

Lalu, selanjutnya, ada yang belum dibahas, khususnya ini mungkin kepada PT Antam, ya. *Sorry*, bukan Antam, Bukit Asam dulu, karena kita tahu pada beberapa waktu yang lalu di hari Pancasila, ada pidato yang juga menyebutkan mengenai transisi energi hijau. Saya harap di sini mungkin Pak Hendi bisa secara, mungkin tertulis kalau memang panjang, itu juga harus dijelaskan *roadmap* ke depan ini akan seperti apa, karena transisi energi hijau ini *kan* juga suatu hal yang memang menjadi, apa namanya, target di 2040-2060 untuk Indonesia bisa memang bertransformasi, ya.

Ini ke depan akan bagaimana PT Bukit Timah ini, ya, mengelola perusahaannya, karena kita tahu cadangannya juga masih banyak, masih besar. Jadi, dengan cadangan yang masih besar, batu bara yang masih banyak, masih besar ini, yang juga kita tahu *demand*-nya di beberapa negara seperti di Filipina, di Indonesia sendiri, dan juga di China masih besar. Namun, target di 2040 atau 2060 ini *kan* juga bukan waktu yang sebentar sebetulnya, kalau misalkan nanti secara global tiba-tiba ada perubahan yang memang tiba-tiba, ini juga harus bisa diantisipasi, mau seperti apa PT Bukit Timah ini, ya? Apakah, kalau yang saya tahu, saya baca, beberapa perusahaan tambang swasta itu mereka sudah mulai memikirkan bagaimana mereka bertransformasi selain hanya, apa, di batu bara, mungkin mereka sudah memikirkan ke *petrochemical* dan lain sebagainya. Jadi, ini jangan sampai Bukit Timah ini juga ketinggalan, Pak Hendi. Jadi, dipikirkan dari sekarang, walaupun nanti targetnya masih lama, tetapi ini sesuatu yang harus memang betul-betul kita cermati, dan juga kita harus benar-benar *concern* mengenai ini. Karena ini bukan hal yang seperti lama, seperti ini tidak akan mungkin terjadi. Ya, kita lihat beberapa waktu yang lalu, tiba-tiba di

perusahaan ataupun industri yang lain seperti telekomunikasi dan informasi, ya, tiba-tiba ada yang masuk ke Indonesia, tiba-tiba jadi ramai, jadi, jangan sampai seperti itu. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi suatu catatan.

Lalu, selanjutnya, tadi sempat dikatakan oleh Pak, teman yang sebelumnya, bahwasanya industri tambang ini juga merupakan akan menjadi salah satu *backbone* pendapatan, pemasukan bagi negara kita untuk ke depannya, agar supaya tentunya yang sudah dilakukan, yang sudah dijalani seperti pembangunan-pembangunan smelter dan lain sebagainya, yang di mana itu difokuskan untuk bagaimana hilirisasi bisa berjalan lebih baik lagi, itu harus benar-benar juga menjadi *concern* dan juga fokus.

Dan juga Antam, mungkin saya juga, saya mendengar juga tadi selentingan bahwasanya, sedikit saja, ini apakah memang ada, ada kebijakan yang tidak *align*, ya, mungkin dari regulator, ya, kepada para ataupun kepada perusahaan-perusahaan tambang seperti Antam ini yang memang tidak *align* untuk kebijakannya? Itu juga mohon dijelaskan. Karena yang saya dengar, selentingan, ya, tetapi saya tidak tahu pasti, karena saya dengar kebijakannya dari tahun ke tahun itu dari regulatornya berubah. Itu yang menyebabkan 6 orang ini yang semuanya posisinya sama sebagai GM, dari tahun ke tahun itu menjadi tersangka. Karena hanya ada kebijakan yang tidak *align* daripada regulator dan juga di PT Antam. Jadi, belum berubah kebijakan sesuai dengan yang diharapkan oleh, dengan regulator, itu juga mohon dijelaskan.

Mungkin itu saja yang paling penting. Mudah-mudahan semuanya ini tidak akan ada lagi kejadian-kejadian ini. Dan juga bisa ada perbaikan yang lebih baik lagi. Saya yakin pendapatan ataupun kinerja laporan keuangan yang sekarang ini, ini masih jauh sebetulnya di bawah potensi yang memang bisa diberikan oleh MIND ID kepada negara.

Itu saja, Pimpinan, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Waalaikumsalam,

Waktunya sudah mendekati kesepakatan kita, jam 2. Masih ada Pak Doni Akbar, juga dari Pimpinan nanti, Pak Sarmuji, juga Pak Hakim. Mohon diatur waktunya.

F-PKS (AMIN AK, M.M.):

Saya, Mas Bimo, Amin, Amin.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):



Pak Amin. Waktunya pendek-pendek, ya.

Pak Doni Akbar.

F-PG (DONI AKBAR, S.E., M.M.):

Baik, terima kasih.

**Pimpinan dan Teman-teman Anggota yang saya hormati, juga
Dirut MIND ID beserta jajaran,
Dirut Antam, Bukit Asam, Freeport, Inalum, dan PT Timah,**

Saya lebih membahas ke globalnya saja, Pak. Jadi, saya tidak akan masuk ke anak usahanya, cuma karena topik kita terkait MIND ID. Jadi, pertama yang saya tanyakan itu begini, dengan Pak Hendi. Pak Hendi, menurut Pak Hendi, dengan adanya MIND ID ini, paling tidak di bawah kepemimpinan Bapak, baik tata kelola maupun kinerja usaha-usaha pertambangan ini, sudah lebih baik atau belum? Apakah tambah buruk ataukah lebih baik menurut dalam pandangan Bapak? Itu yang pertama.

Terus yang kedua adalah bagaimana hubungan saat ini, Pak, antara *holding*-nya, MIND ID-nya, dengan teman-teman atau dengan perusahaan yang lain, Antam, PT Timah, Bukit Asam dan lain sebagainya? Karena saya dengar juga selentingan itu bahwasanya ada beberapa hal terkait dengan kewenangan atau kebijakan yang dilakukan oleh MIND ID untuk terlalu jauh ikut campur tangan ke dalam, baik maupun tata kelola ataupun kinerja ataupun pengambilan keputusan di anak, masing-masing anak usaha. Saya tidak tahu itu benar atau tidak, nanti silakan tolong Bapak sampaikan.

Nah, saya juga dengarkan itu, begini, Pak, jadi kalau dengan memang ketika Bapak masuk ke dalam itu untuk memperbaiki mereka, mereka tidak senang karena ada hal-hal yang dibuat mereka dalam tanda kutip terganggu, itu memang menurut saya yang perlu dilakukan, Pak, itu hal yang baik. Tetapi kalau itu Bapak, saya juga tidak tahu, coba dijelaskan dengan kami, sejauh mana MIND ID ini boleh, apa, menentukan atau mengambil keputusan terkait usaha-usaha yang ada di bawah Bapak ini, Pak?

Terus yang terakhir, Pak, *kan* kita semua tahu, tadi sudah banyak disampaikan oleh seluruh teman-teman, akhir-akhir ini sangat banyak masalah yang timbul ke permukaan, Pak, khususnya permasalahan-permasalahan yang terkait dengan hukum. Yang saya tanyakan itu adalah ini bagian dari usaha Bapak memperbaiki tata kelola anak-anak usaha ini, atau memang ini *nih* mereka timbul dengan sendirinya karena sudah tidak terbandung lagi, begitu *loh*, Pak?

Jadi, biar orang juga tahu. "Ketika kami di sini, Pak, ini masalah ini timbul karena kami melihat bahwa ada permasalahan ini, jadilah seperti ini. Supaya mereka tahu, oh, ini adalah bentuk bagian yang kami kerjakan supaya BUMN ini jadi lebih baik". Atau memang masalah ini timbul dengan



sendirinya dan MIND ID tidak tahu, begitu loh. Jadi, saya ingin Bapak sampaikan itu juga dengan kami.

Itu saja, Pimpinan, dari saya. Terima kasih, selamat siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih, Pak Doni.

Selanjutnya, Pak Amin.

F-PKS (AMIN AK, M.M.):

Sing tuo sek yo.

Terima kasih Pimpinan dan Teman-teman semua yang saya hormati, dan Jajaran Direksi MIND ID, Pak Hendi, dan semua jajaran yang saya hormati,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Saya tahu diri karena datang terlambat, habis di, rapat di sebelah. Singkat saja, Pak, pertanyaan saya. Pertama, sifatnya penegasan apa yang sudah disampaikan oleh saudara kami tadi, Pak Jon, Pak. Tentang potensi tambang, ini mestinya bisa menjadi *backbone* pembangunan kita, Pak, biaya pembangunan kita, setelah pajak, kalau perlu mungkin mestinya setara dengan pajak. Tetapi yang kita baca dari tahun ke tahun, itu laporan keuangan Bapak ini masih, kalau saya pakai *feeling* saja, ini masih jauh dari harapan. Lebih banyak, bahkan yang paling lucu, kalau masih ada yang rugi, ya. Sementara kasus-kasus yang lain, kasus-kasus belakangan *semakin* banyak yang muncul ke permukaan. Jadi, harapan kami, harapan sekaligus tantangan ini, Pak, coba, Pak, memetakan, memberikan laporanlah kepada kami potensi-potensi, kemudian dari potensi itu dikelola mestinya bisa menghasilkan berapa dan juga, apa namanya, permasalahan-permasalahan yang dihadapi, jangan sampai kita tahu belakangan, muncul sekian ratus triliun kerugian atau dampak kerusakan yang ditimbulkan, ya.

Kita hanya tahu dari media, kaget-kaget terus, padahal kita tahu ini potensi keuntungannya dan kontribusinya untuk negara ini mestinya sangat, sangat-sangat besar. Bukan masalah kerugiannya yang muncul yang sangat besar, tetapi mestinya sumbangsinya ke negara yang sangat besar, ya. Kemudian, itu yang pertama, Pak, ya.

Yang kedua, ini saya baca MIND ID baru saja membentuk *subholding shipping and logistic* ini. Pertanyaan saya untuk Pak Hendi, apakah ini tidak membuat persaingan tidak sehat antar BUMN, ya? Atau antar anak



perusahaan BUMN seperti PT Pertamina Shipping misalnya, yang melayani segmen yang sama? Itu, Pak, itu saja pertanyaan dari saya, singkat.

Terima kasih, Pimpinan dan Teman-teman semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terakhir dari anggota, silakan Pak Halim.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Hakim, Pak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Pak Hakim.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Iya, kalau rumah memang di Halim, rumah.

Matur suwun, Pakde Bimo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang hadir,
Yang saya hormati jajaran Direksi MIND ID *Holding* dan *Subholding*, Pak
Hendi, Pak Dilo, beserta
Seluruh jajaran Direktur Utama *Subholding*,**

Karena terakhir dan waktu dibatasi, mungkin ada dua hal, Pak Hendi, dan secara *general* yang akan kami sampaikan. Mungkin ini rapat terakhir sebelum berganti periode, Pak, karena masa sidang berikut, belum tentu, *enggak* tahu saya, MIND ID nanti diundang kembali atau tidak, jadi ya, ya *enggak* ada salahnya *lah* saya menyampaikan beberapa hal mungkin di sini, Pak.

Ada dua, ada dua poin, Pak Hendi. Yang poin pertama adalah sebenarnya saya ini penasaran, Pak, berulang kali *holding* pertambangan kita ini bertubi-tubi, Pak, saya meyakini bahwasanya yang, saya meyakini bahwasanya yang duduk di jajaran direksi, kemudian yang memang bekerja di seluruh *holding* MIND ID itu, itu sudah melalui proses seleksi yang ketat dan secara kompetensi itu sudah luar biasa, Pak. Belum tentu kalau saya mungkin *ngelamar* di jajaran *holding* MIND ID, belum tentu saya mungkin bisa tembus, Pak.



Nah, akan tetapi dengan kompetensi yang luar biasa seperti itu, saya sedikit bingung, Pak, di *subholding-subholding*, tiap *subholding* itu punya permasalahan-permasalahan yang unik-unik dan *wadidaw-wadidaw*, Pak. Ada yang kemudian *fraud* di dalamnya karena moral hazard, ada kemudian yang dalam perencanaan-perencanaan pengadaan kapasitas produksi dan lain-lain sebagainya itu mengalami permasalahan yang luar biasa, ada yang kemudian, kemudian sama-sama beroperasi, yang BUMN itu mendapatkan kapasitas pengiriman sedikit, tetapi yang swasta bisa mendapatkan pengiriman yang luar biasa.

Nah, sebenarnya saya ingin tahu, Pak, faktor-faktor yang mendasar terjadinya permasalahan-permasalahan yang sungguh mengejutkan di tubuh *holding* BUMN Pertambangan ini sebenarnya apa, Pak? Karena saya belum melihat secara jelas, belum melihat secara detail, *statement* yang memang dikeluarkan daripada *holding* berkaitan dengan permasalahan yang sering terjadi ini apa. Jadi, kelak kami ini sebagai mitra, saya *enggak* tahu, saya apakah kemudian saya periode depan di komisi VI atau di komisi VII atau di komisi berapa, saya belum tahu, Pak. Tetapi ini sudah menjadi keniscayaan kita sebagai mitra ini bisa mengetahui dan bisa sama-sama mengurai. Karena saya melihat sekarang ini memang benar-benar ingin diperbaiki tubuh daripada *holding* BUMN Pertambangan kita. Itu yang pertama, Pak. Faktor-faktor utama kira-kira apa *sih*, Pak, yang menyebabkan seperti ini, sayang, Pak.

Kemudian yang kedua, Pak. Sebagai amanah daripada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Undang-Undang BUMN, di situ dijelaskan, memang ada BUMN yang berfokus kepada kemaslahatan masyarakat, ada juga yang memang untuk mengejar dividen. Ditopang juga sama Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, karena ini konteksnya pertambangan. Nah, saya ingin tahu, Pak, MIND ID sebagai *strategic holding*, betul, Pak, ya? Pak Dilo? *Strategic holding*, ya? Pernah *enggak sih* merumuskan sebuah *forecast* perencanaan, kira-kira kalau *enggak* ada kejadian-kejadian yang *wadidaw* seperti sebelum-sebelumnya kemarin, potensi dividen yang bisa diberikan ke negara berapa besar? Timah remuk, ya *kan*, Antam saya salut sama Pak Nico berusaha mentransformasi, PT BA saya kurang tahu secara jelas, orang rehnya saja masih besar swasta, betul, *toh*, Pak? Freeport yang kemarin waktu mengambil alihnya, ya seperti itulah.

Nah, sebenarnya kami ingin tahu, Pak. Ya, mohon maaf saya bawa-bawa usia, bukan dalam arti apa-apa, Pak, ya, tetapi saya ini mungkin sebagai generasi-generasi penerus, juga *pengin* tahu sebenarnya berapa *sih* potensi yang bisa diberikan BUMN *holding* pertambangan kita kepada negara, kalau misal tidak ada kejadian-kejadian, jadi, aktual *value*-nya berapa dividen yang bisa diberikan kepada negara? *Lah*, nanti di situ bisa kelihatan, Pak. Kita sebagai mitra dari legislatif juga ikut bisa memberikan pengawasan. Jadi, saya rasa dua poin itu, Pak Hendi, beserta seluruh jajaran *Holding* Pertambangan.

Yang pertama, mungkin faktor penyebabnya. Dan yang kedua, kira-kira berapa *sih*, Pak, kalau misalnya tidak ada kejadian, berapa dividen yang bisa diberikan kepada negara sesuai dengan amanah Undang-Undang BUMN Nomor 19 Tahun 2003.

Pakde Bimo, *matur suwun sanget* atas waktunya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih, Pak Hakim.

Selanjutnya, dari meja Pimpinan, kami persilakan, Pak Sarmuji.

WAKIL KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih, Pak Bimo, sebagai Pimpinan Sidang.

**Pak Dirut MIND ID dan seluruh jajaran yang saya hormati,
Anggota Komisi VI yang saya hormati,**

Tadi teman-teman, rekan-rekan banyak yang menanyakan peristiwanya, peristiwa *fraud*, peristiwa kejahatan di BUMN. Ada juga barusan yang lebih dalam menanyakan tentang faktornya apa. Saya ingin menanyakan lebih dalam lagi, mengapa semua peristiwa itu terjadi dan berulang terjadi. Supaya kita bisa, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi bisa untuk mengantisipasi *problem-problem* ke depan. Kalau kita sudah bisa menjawab mengapa semua terjadi, kemungkinan kita bisa melakukan diagnosis diri dan diagnosis dini, dan bisa mengantisipasi supaya hal-hal yang tadi terjadi, tidak terjadi lagi.

Apakah gaji pegawai BUMN itu kurang, misalkan? Saya yakin *enggak*. Apakah moralitas pegawai BUMN itu rusak semua? Saya yakin juga tidak. Saya yakin pegawai BUMN itu masih banyak yang baik dan mungkin juga sebagian besar juga baik. Apakah pengawasannya yang kurang? Karena bisa jadi orang baik, berada di dalam kesempatan yang tertentu, bisa menjadi tidak baik, tergoda karena kesempatannya terlalu luas, pengawasannya kurang.

Lalu apa peran dari komisaris-komisaris yang ada di anak-anak perusahaan itu? Komisaris-komisaris di anak perusahaan, di Antam, di Freeport, di Timah, dan sebagainya, itu *kan* kepanjangan tangan dari *holding*, kira-kira itu *kan*, karena *holding*-nya adalah pemegang saham. Lalu apa yang dititipkan oleh *holding* kepada komisaris-komisaris yang ditunjuk dengan gaji yang cukup besar itu? Tentu ini merupakan tugas yang harus diwanti-wantikan oleh *holding* terhadap komisaris yang tugasnya itu melakukan pengawasan.

Saya pernah menyarankan pada Menteri BUMN untuk membuat *desk khusus*. *Desk khusus* itu untuk memberikan *early warning* kalau terjadi *fraud* di seluruh BUMN-BUMN. Tetapi, jawaban Pak Menteri waktu itu, itu kita sudah menunjuk komisararis-komisaris di seluruh perusahaan-perusahaan yang fungsinya adalah pengawasan. Jadi, kemungkinan ada *redundant* seandainya ada *desk khusus*. Tetapi, melihat kejadian-kejadian yang terus berulang itu, saya kembali ingin menyarankan terbentuknya satu *desk khusus*, kalau tidak di Kementerian BUMN, ya di *holding*.

Holding harus bisa mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan *fraud* di seluruh anak perusahaan, modusnya seperti apa, antisipasinya seperti apa, mengapa itu semua terjadi, harus bisa dirumuskan oleh *holding*, sehingga kejadian-kejadian yang selama ini terjadi, sudah, tutup buku saja, ke depan tidak terjadi lagi, ya. Harapan kita begitu, harapan kita mudah-mudahan nanti itu bisa diantisipasi, tetapi menjawab pertanyaan mengapa dan faktor apa itu, itu sesuatu yang kami tunggu, Pak Dirut. Kita identifikasi, kita serius betul, kita betul-betul seriusi, coba mulai sekarang kita berkomitmen pada diri kita sendiri supaya kejadian-kejadian tadi tutup buku. Karena nilainya fantastis.

Saya terus terang kalau *fraud* itu, kejadian-kejadian tadi, kerugian misalkan, itu terjadi karena skema bisnis, kita bisa maklum. Karena namanya bisnis, ya kalau *enggak* untung, ya rugi. Kalau suatu kebijakan bisnis, kalau tepat diagnosis kita, ya untung di masa depan. Tetapi kalau diagnosis kita salah, kemudian rugi. Tetapi itu semua sudah dilakukan kajian dan itu adalah langkah bisnis, bukan karena kejahatan tertentu, tetapi kalau kejahatan tertentu, kita harus cari betul mengapa dan faktornya apa, lalu kita rumuskan, bagaimana itu semua tidak terjadi di masa depan. Barangkali itu saja dari kami, Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Demikian pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Anggota Komisi VI. Saya tetap tegaskan kembali untuk *holding* bahwa tantangan kita tidak mudah, secara domestik maupun secara global. Situasi-situasi ke depan ini banyak, kalau kita baca dari jurnal internasional, dari berbagai media maupun akademisi, bahwa situasi perekonomian tidak terlalu bersahabat dengan kepentingan-kepentingan *national interest* kita.

Krisis di China itu sangat berpengaruh terhadap berbagai komoditas kita. Begitu juga terkait dengan situasi di jalur Gaza. Apalagi kalau Iran nanti akhirnya tetap tidak bisa terkendali dengan Israel. Begitu juga situasi krisis keuangan di Amerika. Begitu juga Ukraine. Ini saya kira kita perlu cermati



betul dan kita berharap tantangan-tantangan itu akan mampu diatasi oleh berbagai perusahaan nasional kita termasuk BUMN.

Dulu mimpi kita 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi ini membangun satu fondasi untuk kita masuk ke industri 4.0 dengan industrialisasi dan hilirisasi di sektor kelautan, pertanian, perkebunan, di sektor mineral, dan sumber daya alam serta pariwisata. Tetapi kita melihat bahwa dengan berbagai restrukturisasi di BUMN, akhirnya dari berbagai kasus juga tidak melihat ada sesuatu hal yang semuanya positif, tetapi ada hal yang perlu kita benahi secara bersama-sama.

Tadi sudah diuraikan beberapa teman, kalau di Antam jelas kita membutuhkan, Pak Dirut, langkah-langkah strategis apa yang dilakukan MIND ID selaku *holding* untuk dapat mencegah kejadian semacam ini? Sekali lagi, sebagai *holding* di Antam, ini *kan* dilakukan dengan, apa ya, hal yang negatif tetapi bisa dipelihara secara turun-menurun dari tahun 2010 sampai 2022. Dan komisarisnya pun juga ada yang dari *Holding*.

Saya kira ini perlu di, dijelaskan, untuk tidak terjadi lagi hal-hal yang terjadi di Antam. Dan tadi benar, ini masyarakat juga *pengin* tahu, apakah itu labelnya? Apakah itu proses barangnya? Yang supaya tidak terjadi keributan atau berbagai informasi di media sosial terutama, apa yang sebenarnya yang terjadi dalam kasus jual beli logo Antam oleh pihak, pihak swasta ini? Apakah hanya untuk penjualan juga di dalam negeri atau diekspor? Ataukah produk ini juga mengalir ke ekspor? *Kan* ini juga banyak info ekspor ilegal, ya. Cara membawa emasnya keluar itu bagaimana?

Dan apakah emas yang dibawa ke Antam itu juga legal? Atau emas-emas ilegal yang kayak di timah? Kalau ilegal, terus proses masuknya *gimana*? Memang *enggak iso*? Kalau legal *kan* juga bisa ditelusur. Kita *pengin* dapat masukan itu, ini emasnya emas ilegal atau emas legal yang masuk ke Antam ini? Atau emas hasil tambang PT lain yang, yang legal? Ada PT-PT tambang lain legal masuk ke Antam, atau emas ilegal masuk tambang, masuk ke Antam, ya? Nah, kalau ilegal, terus bagaimana perpajakannya? *Kan* itu.

Kemudian mengenai Bukit Asam, Pak. Ini Bukit Asam, ada hal yang perlu kami tanyakan terkait mengenai kasus korupsi dana pensiun PT Bukit Asam, bagaimana prosedur pemilihan PT *Strategic Management Service*-nya? Ini juga muncul. Mengapa bisa transaksi saham dengan PT Eureka Prima Jakarta di pasar negosiasi tanpa memorandum analisis investasi sebagaimana disyaratkan dalam pedoman operasional investasi dana pensiun Bukit Asam, ya? Peran bagai, peran bagian apa PT Bukit Asam yang tidak melakukan tugasnya sesuai dengan hal yang terjadi? Ini supaya juga, maksud saya, saya sepakat tadi dari PT Inalum untuk hal yang terkait dengan kerja sama PLN, mungkin minta, bisa minta bantuan untuk kita pertemukan juga, apa yang menjadi kendala, mengapa cukup lama, tentang kesepakatan harga, bagaimana kelanjutan rencana dirut PT Inalum, ya, untuk melakukan kerja sama operasional dan *joint*, atau *joint venture* dengan PT PLN.



Dan yang terakhir, untuk Inalum, IPO-nya perkembangannya seperti apa, Bu? *Kan* sudah cukup lama itu kita bahas di forum Komisi VI. Hambatannya hingga saat ini apa? *Kok* sampai tertunda, ya. Sejak akhir 2022. Kalau PT Timah, Pak Sarmuji nanti akan lebih banyak mendalami. Mengenai PT Freeport tadi, Pak, keterlambatan pembangunan yang tidak sesuai dengan perkiraan itu, bagaimana kendala-kendalanya untuk cepat diatasi? Dan tentunya temuan dari BPK juga bisa ditindaklanjuti dengan Kementerian ESDM. Itu yang kira-kira bisa kami sampaikan dari Anggota maupun Pimpinan.

Selanjutnya, Mas Dirut, bisa direspons mana-mana yang itu penting buat publik, nanti yang kira-kira perlu jawaban tertulis, tetapi ada yang bisa dijawab secara langsung di sini, tetapi juga perlu dijawab secara tertulis, nah, dua-duanya. Karena kita *pingin* punya dokumen yang nantinya bisa kita bawa. Tentunya hasil RDP adalah rapat dengan menteri, ya, rapat dengan Pak Erick Thohir, untuk juga kita minta *kan* Menteri BUMN sebagai pembina BUMN-BUMN dengan prestasi-prestasi yang ada maupun langkah-langkah yang perlu lebih antisipatif dengan berbagai masalah yang ada di BUMN.

Waktu dan tempat kami persilakan, Pak Hendi Prio Santoso.

DIREKTUR UTAMA PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (HENDI PRIO SANTOSO):

Terima kasih, Pak Aria Bimo, Pak Sarmuji.

Bapak-Bapak dan Ibu Anggota Komisi VI DPR yang kami hormati dan banggakan,

Kami pertama-tama ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas atensi, perhatian, dan kepedulian yang disampaikan atas *concern-concern*, kritik maupun saran dan masukan yang disampaikan. Kami akan *Insha* Allah memakai saran dan arahan Bapak-bapak dan Ibu sekalian untuk sebagai sarana perbaikan kami ke depan.

Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mendasar mungkin mengenai, pertama adalah interaksi antara *holding* dengan anggota. Kami ingin menjelaskan bahwa MIND ID itu lahir di 2019, terutama dalam rangka akuisisi PT Freeport Indonesia sebenarnya. Jadi, ada penggabungan daripada aset-aset dan investasi yang ada di beberapa tambang BUMN, dijadikan satu *holding company*. *Alhamdulillah*, 2019 sudah berjalan dengan baik, Freeport sudah terakuisisi. Tadi ada pertanyaan, apakah langsung 51,2? Tidak, ada tahapannya. Waktu itu kalau *enggak* salah masih sekitar 40-an, ya, Pak? Oh, 19% itu saham, ya, terus ada opsi, apa namanya, namanya produk kuasa *dead* dan *equity* yang baru terkonversi di tahun 2023, sehingga akhirnya kepemilikan sahamnya menjadi 51,2%.

Kemudian, kami sendiri yang ada di sini pada hari ini, kami bergabung di MIND ID itu di akhir 2021. Jadi, efektif kira-kira Januari 2022, tim



manajemen baru di MIND ID masuk. Kami waktu itu pertama-tama melakukan, apa namanya, pemahaman atas, apa namanya, status daripada kinerja dan kondisi yang dihadapi oleh para masing-masing anggota BUMN tambang ini.

Akhirnya, kami mengusulkan kepada Kementerian BUMN agar, memang diciptakannya sebagai *strategic holding*, artinya kami tidak terlibat operasional atau eksekusi dari sisi operasi sama sekali. Juga ada kondisi di mana anggota kami adalah perusahaan Tbk, Pak, artinya sebagai *public company*, tentunya interaksi, apa namanya, hubungan antara *holding* dengan anggota ini tidak bisa operasionalisasi, tidak bisa ada instruksi, kita harus melewati mekanisme yang ada sebagai perusahaan Tbk.

Artinya, interaksinya paling utama terjalin pada waktu RUPS. RUPS, baik itu tahunan maupun RUPS luar biasa terhadap para anggota. 2022, kami mengusulkan kepada Kementerian BUMN agar ini bisa ditingkatkan. Syukur, *alhamdulillah*, Kementerian BUMN juga memberikan kami wewenang berupa kuasa dari Seri A, artinya kami memegang kuasa daripada pemegang saham, yaitu pemerintah, melalui Kementerian BUMN. Akhirnya kami melakukan peningkatan, yaitu kita melakukan manajemen kinerja melalui kontrak, kontrak, apa namanya, manajemen, yang ditandatangani setahun sekali setiap pada periode perencanaan RKAP.

Kemudian, kami juga, apa namanya, mengadakan kontrak *performance indikator*, artinya kinerja keuangan, kinerja operasional itu kita lakukan sebagai dasar bagaimana para anggota ini kita kelola.

Yang ketiga, kita juga melakukan pengawasan, terutama melalui media yang juga *available* untuk memegang saham lainnya karena ini perusahaan Tbk, yaitu melalui *audited financial report*. Jadi, basisnya kami melakukan pengawasan adalah kinerja yang *ter-audited* oleh kantor akuntan publik.

Yang keempat, kami juga melakukan pengeluaran pedoman secara strategis, itu kami mulai tahun 2022, tahun 2022. Juga kami, terus-terang, mendapatkan peta inventaris permasalahan yang kami warisi dari pendahulu kami sebelumnya. Ada beberapa kondisi, satu, adalah terkendalanya proyek-proyek strategis, waktu itu proyek SGAR macet. Pada waktu kami masuk, kondisinya macet sudah dua setengah tahun, terkendala karena, apa namanya, konflik antara kontraktor dengan perusahaan.

Kedua, juga terkendalanya *smelter*, antara lain *smeltemya* Antam, Feni Haltim, dan lain-lain. Yang ketiga, juga waktu itu progres di Freeport, dianggap itu telat yang *smeltemya*. Jadi, tentunya kami fokus bagaimana kita melakukan solusi dan penanganan permasalahan atas proyek-proyek strategis ini.

Yang kedua, kami juga sebenarnya itu sudah, apa ya, terindikasi ada *some problem* yang sangat besar yang, yang ada di PT Timah. Untuk itu, kami sudah melaporkan, Pak, kami sudah melaporkan ini kepada Kementerian koordinasi kami, yaitu Kemenko Marves. Waktu itu kita rapatkan

bersama, bahkan diundang dari Jaksa Agung, Kepala KPK, Kepala BPKP, dan lain-lain, kami ungkap permasalahan. Ditindaklanjuti oleh forum gabungan yang dipimpin oleh Menko Marves ini, dengan dilakukannya audit BPKP. Saya rasa produk penertiban hukum yang ada hari ini, itu adalah konsekuensi daripada temuan audit BPKP. Jadi, bukannya kami berdiam diri, memang kami tidak dapat menyampaikan secara publik, karena waktu itu kita angkat ke forum yang lebih tinggi daripada kami.

Yang berikutnya, yang kasus-kasus di Antam. Saya, *Insyah* Allah dengan Pak Nico, bisa menjamin bahwa periode kami, 2022 sampai sekarang, *Insyah* Allah masalah-masalah yang lalu ini yang kita warisi, *Insyah* Allah akan berkurang, bahkan mungkin mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Kenapa? Karena, contohnya untuk urusan pelanggaran cap lebur emas ini, sudah kita *stop* di akhir 2021, sejak kami, apa namanya, ada, Pak Nico juga ada, itu sudah di-*stop* kegiatan ini. Kegiatan yang ke belakang memang, ya, kami tentunya sebagai ahli waris, harus melakukan solusi permasalahan. Dan itu sudah beberapa hal kami lakukan.

Terus kemudian mengenai kinerja, saya, *alhamdulillah*, sangat bersyukur dan berbangga bahwa kinerja kami sejak periode kami, itu menunjukkan kinerja yang *alhamdulillah* baik, Pak. Jadi, mungkin mohon kami ulang sedikit, dari sisi pencapaian laba, naiknya 30 persen CAGR-nya. Dari sisi EBITDA juga itu sedemikian baik. Juga harus dipahami, kalau dividen itu bukan besaran kesanggupan kami, tetapi apa yang diminta oleh pemegang saham, yaitu Kementerian BUMN terhadap kami, Pak. Kita di 2023 setor 7,5 triliun bukan karena kesanggupan kami hanya *segitu*, tetapi kami dimintanya *segitu*.

Tetapi, tentunya kita juga memahami kenapa Kementerian BUMN memintanya hanya *segitu*, karena mereka melihat, kita dalam periode pengembangan. Sepertinya, Bapak-Bapak dan Ibu semua tahu, kita dapat tugas hilirisasi, ini membutuhkan modal, *capital expenditure* yang sangat besar, Pak.

Di Freeport contohnya, biayanya itu 3,8 miliar dolar untuk membangun *smelter* tambahan. Kemudian juga di Antam, yang hampir 1 miliar, ya? Dolar, ya? Ya, kan. Kemudian di PT BA yang juga sudah menggelontorkan dana ratusan juta dolar untuk Sumbagsel 8. Ini semua membutuhkan *capex*. Jadi, tentunya, laba yang kita hasilkan yang *alhamdulillah* di 2023 mencapai 27,5 triliun, artinya hampir dua kali daripada perolehan di 2021, sebagian harus dicadangkan untuk pembiayaan *capital expenditure*, Pak.

Nah, itulah, jadi tentunya sekali lagi, dividen itu bukan berapa besaran yang kami sanggupi bisa setor, tetapi apa yang diminta. Tetapi, tentunya pemegang saham juga memahami ...

F-PD (Dr. Ir. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Sebagian besar kan dari Freeport kalau *enggak* salah itu?



DIREKTUR UTAMA PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (HENDI PRIO SANTOSO):

Enggak juga, Pak. Jadi, hampir setengah-setengah *lah* rasionya, Pak Herman.

Jadi, mungkin itu konteks yang perlu saya sampaikan. Terus tadi mungkin secara umum *concern*-nya Pak Sarmuji, *concern*-nya Pak Amin, dan lain-lain, sebenarnya apa *sih* dasar permasalahannya? Jadi, memang kita ketahui *lah* apa yang kita warisi ini banyak permasalahan, tetapi juga kita tidak berdiam diri karena juga sudah ada perbaikan, Pak. Jadi, dari sisi satu, tadi pedoman strategis kita mulai keluaran mengenai GCG, *Code Ethic Governance*, *fraud management*, memang ini baru terjadi di 2023 karena tentunya. Ada sekarang Direktur Manajemen Risiko yang ditaruh di *holding* maupun dirangkap oleh Direktur Keuangan di masing-masing anggota kami, Pak. Ini sudah kita ciptakan komite tata kelola yang baru, komite etik, komite yang berjenjang, yang di dalamnya juga mengikutsertakan para komisaris, baik di anggota maupun di *holding*, Pak. Pengawas kami juga ikut menjadi bagian daripada komite terpadu ini. Jadi, *Insy* Allah saya sampaikan, kita sudah berupaya lebih baik, *insya* Allah ke depannya mudah-mudahan juga lebih baik. Tetapi, memang warisan permasalahan dari 2010 sampai 2021 inilah yang memang *timing*-nya mungkin, ya rezeki anak saleh, baru keluarnya di periode kita, Pak.

Jadi, mungkin itu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Tetapi, saya ingin teman-teman tadi juga karena banyak *concern* langsung kepada Antam, kepada BA, maupun Inalum, maupun Timah, bisa menambahkan, saya rasa yang, yang penting-penting, Pak. Nanti kami akan sampaikan juga jawaban kami secara tertulis atas semua pertanyaan dan penjelasan yang akan disampaikan.

Silakan.

WAKIL KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Izinkan, Pak, sebentar.

DIREKTUR UTAMA PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (HENDI PRIO SANTOSO):

Iya, Pak.

WAKIL KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Jadi, kami senang dengan komitmen Pak Dirut, Pak Hendi, bahwa ini adalah warisan masa lalu dan diselesaikan hari ini. Tetapi, orang-orang yang kemudian menjadi direksi beberapa tahun yang lalu, itu mengatakan hal yang



sama kira-kira, “Kalau ada persoalan, ini warisan periode lalu”. Lalu warisan itu diwariskan kembali ke periode berikutnya, dan kemudian ada kemungkinan juga, mudah-mudahan tidak, saya berharap tidak, tetapi kalau ini tidak ada komitmen untuk menghentikan, termasuk membangun sistem yang baik, nanti Dirut berikutnya akan *ngomong* sama, “Ini warisan masa lalu”.

Saya betul-betul tidak berharap nanti orang mengatakan, “Ini warisan Pak Hendi”, betul-betul tidak berharap ada orang yang mengatakan itu. Karena itu, mari ini betul-betul kita seriusi, kita jaga betul komitmen kita dalam bentuk membuat satu sistem yang betul-betul mengurangi peluang-peluang untuk terjadinya *fraud* tadi itu. Begitu, Pak Hendi.

Terima kasih.

DIREKTUR UTAMA PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (HENDI PRIO SANTOSO):

Siap, Pak.

F-PD (Dr. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Ketua, interupsi sedikit, Pak Ketua.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Saya harus *ngatur* waktu.

F-PD (Dr. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Tiga puluh detik.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Saya akan undang lagi mungkin dua atau satu-satu untuk lebih dalam di dalam RDP khusus dengan Komisi VI. Tetapi untuk yang saat ini, yang saat ini menjadi pembicaraan di publik, baik di *mainstream*, *online*, maupun medsos, itu soal emas, maka, pertanyaan pendalaman dari kawan-kawan soal emas itu bisa dijelaskan oleh Pak Nico. Selanjutnya, untuk *subholding-subholding* yang lain, nanti akan kita undang secara khusus. Saya kira itu, Pak Dirut.

F-PD (Dr. Ir. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Saya, 30 detik.

Pak Hendi, justru saya ingin menguji Pak Hendi di sini sebagai Direktur Utama *Holding*, begitu. Jadi, biasanya justru penguasaan-penguasaan seluruh *subholding* itu ada di *holding*, begitu. Maka itu, *enggak* juga hanya menampilkan hasil laba konsolidasi.



Kemudian, justru kita ingin melihat apa *sih* yang mau dilakukan oleh MIND ID, begitu *loh*, sebagai *holding*. Jadi, jangan juga kemudian lempar batu sembunyi tangan atau lepas tangan, begitu. Saya melihat *kok* relaks-relaks saja, begitu. Semestinya *kan*, “Oke persoalan Antam, saya akan melakukan akselerasi pengembangan di Antam seperti ini”. Artinya, jelas kelihatan bahwa *holding ya holding*, begitu. *Holding* mampu untuk bisa mengkonsolidasikan seluruh kegiatan. Bahkan, kalau bisa *enggak* usah bicara *subholding*, “Saya akan bicara sebagai *holding*”, jelas itu pertanggungjawaban. Kalau *enggak* ada, buat apa dibentuk MIND ID? Ya kembalikan saja mereka menjadi BUMN tersendiri, begitu, kalau memang *holding* tidak mampu untuk bisa mengkonsolidasikan berbagai persoalan, bukan hanya mengkonsolidasikan keuntungan, begitu. Ini yang, yang ingin saya dengar justru hari ini.

Maka itu dari awal, kenapa tidak hadirnya dirut Freeport misalkan, ya sebutkan saja ketidakhadiran ini. Terus yang kedua, masalah kasus ini sedang kami tangani, kami juga tangani di *holding*, dengan memberikan pengawasan khusus, manajemen risiko telah bekerja, apa hasil dari manajemen risiko, begitu *dong*, Pak. Jangan, ya sebentar-sebentar dikembalikan lagi ke Dirut masing-masing *sub-holding*, ya buat apa, begitu *loh*, ada MIND ID di situ.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Silakan, Pak, ke emas *dulu*.

DIREKTUR UTAMA PT ANEKA TAMBANG (NICOLAS D. KANTER):

Izin.

**Terima kasih Pak Pimpinan yang kami hormati,
Seluruh Anggota Komisi VI,**

Karena tadi banyak sekali pertanyaan terkait dengan emas. Saya mesti mengakui bahwa hal ini masih di dalam tahap kami mempersiapkan. Karena ini agak jadi sensitif, Bapak Pimpinan, karena *kan* ini *kan* ada Kejaksaan yang, tuduhan dari kejaksaan, kemudian kita *kan* sedang mempersiapkan termasuk kajian yang saya sampaikan. Tetapi, karena kami tahu bahwa tadi Pak Husni juga menyampaikan, *kan* waktunya ini sekarang adalah sangat *critical*, karena orang-orang sekarang sudah mulai banyak yang meminta untuk menarik emas atau dia mau menjual emasnya. Oleh karena itu, pertama, yang harus kami klarifikasikan dan sudah disepakati oleh Kejaksaan, bahwa tidak ada emas palsu. Ini penting sekali karena saya *tuh enggak* punya waktu untuk mempersiapkan argumentasi, semua yang lain, ini ada.

Hanya ada satu hal yang saya perlu sampaikan di sini, bahwa tadi menyambung yang disampaikan oleh Pak Sarmuji, di dalam tambang ini, Pak, sangat-sangat *complicated issued*-nya, karena banyak pihak yang memang mau ikut campur *me-manage* pertambangan. Nah, maksud saya banyak pihak ini adalah tentunya pihak-pihak, *even* yang ada di dalam penguasa.

Oleh karena itu, kita *tuh* sebgas apa pun kita buat tata kelolanya, pasti akan ada celah-celah yang bisa, siapa saja bisa masuk untuk mengembangkannya. Saya *enggak* bisa mengatakan bahwa sebelum kami itu kotor atau bersih, tetapi saya yakin semua manajemen, semua direksi yang memegang amanah, pasti mereka akan melakukan yang terbaik. Mungkin ada 1-2 yang memang mempunyai niat yang tidak baik, tetapi saya yakin semuanya mempunyai amanah untuk menjalankan dengan baik.

Nah, yang jadi masalah, ini *kan* kalau kita lihat ke belakang, ini ada 4 GM dalam kurun waktu dari tahun 2010 sampai 2021. Masa berjemaah sama dan semua mempunyai niat yang busuk, *kan*, menurut saya *sih* agak sedikit terlalu cepat untuk disimpulkan demikian.

Oleh karena itu, kami lagi melihat, *the business* yang namanya peleburan ini masih menjadi pertentangan. Di kami melihat ini adalah jasa lebur cap adalah bagian daripada *manufacturing*, tetapi kalau kita baca sama-sama ya, Pak, tuduhan yang pertama yang dikatakan oleh, oleh Kejaksaan, bukan tuduhan, tetapi kesimpulan dari kejaksaan. "Merek dan logo Antam merupakan hak eksklusif dari PT Antam, sehingga harus didahului dengan kontrak kerja, dan ada biaya yang harus dibayarkan bagi pihak yang menggunakan merek Antam". Itu tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak-Bapak, jadi, *enggak* mungkin *kan*. Pak Rudi tersampaikan, apakah itu di, cap itu tidak dibayar? Nah, ini yang masih kita telusuri dan kita mau buktikan, bahwa sebenarnya lebur cap itu sudah menjadi bagian daripada jasa *manufacturing*. Tetapi, saya *enggak* bisa bilang dulu sekarang bahwa ini semua sudah ditunjang oleh kajian ataupun praktik-praktik yang kita lihat ke belakang, Pak, karena data-datanya juga tidak mudah untuk kita kumpulkan.

Kedua, dikatakan di sini bahwa "Emas yang dicetak oleh pihak ketiga menggerus pasar dari logam mulia milik PT Antam sehingga kerugiannya menjadi berlipat ganda". Nah, kalau kita lihat, emas Antam yang dicetak oleh pihak ketiga dengan dibandingkan dengan emas yang kita juga jual, sebenarnya kita malah mendapatkan peningkatan. Tetapi *kan* opini itu benar, oh, kalau memang akhirnya mereka, pihak ketiga, yang tidak terafiliasi dengan Antam bisa melebur cap, diuntungkan *dong* dia. Tetapi, apakah dengan dia diuntungkan, kita jadi rugi? Kalau lihat data awal, kita ini *enggak* rugi, karena bukti bahwa Antam juga meningkat *performance* nya.

Tetapi, apakah saya bisa mengklaim bahwa kerugian itu sebenarnya tidak? Atau mungkin keuntungan akan jauh lebih banyak lagi? Nah, hal-hal ini saya *enggak* bisa juga sampaikan sekarang di sini, karena memang belum ada. Jadi, belum, belum tertunjang oleh data dan kajian yang kita sedang buat. Dan saya *enggak* mau, ini *kan* jadi malah terkutip seolah-olah kita



memberikan suatu konklusi yang *totally* bertentangan dengan apa yang disampaikan.

Ya, *enggak* apa-apa, ini *kan* yang, makanya saya bacakan apa yang dituduhkan dan saya bilang bahwa tuduhan itu memang ada kebenarannya. Palsunya, sebenarnya dari Kejaksaan, Pak Herman, tidak disebutkan palsu, kalau kita dengarkan benar-benar. Tetapi *kan* media itu *kan* menuliskan emas palsu 109 ton. Padahal, kalau kita dengar Pak Kuntadi, di dalam *statement*-nya itu tidak sama sekali menyebutkan emas palsu.

Makanya oleh Pak Kapuspen akhirnya dijelaskan bahwa bukan emas palsu, itu yang paling penting buat kita, kita harus. Ya, nah ini, tetapi tidak dibilang palsu, kualitasnya dibilang rendah atau dibilang cap-nya, atau tadi yang Pak, Pak Nyoman tadi sampaikan, bahwa apa bedanya *sih* yang namanya logo, *brand*.

Nah, *brand licensing* ini memang jadi opini daripada Kejaksaan yang menurut saya juga benar. Harusnya, ada biaya untuk yang namanya *brand licensing*. Tetapi *dulunya*, ini harus saya lihatkan *dulu*, *kan* saya mesti periksa lagi, Pak, data-datanya. Apakah jasa *manufacturing* ini sudah masuk biaya *licensing* tersebut? *Kan ini kan* jadi isu. Jadi, kalau kita tidak sama sekali *charge*, memang benar itu jadi salah, tetapi saya yakin ini dulu di-*charge*, Pak. Karena *enggak* mungkin *kan*, Pak, ada 4 GM dalam kurun waktu 10 tahun, 6 itu, 2 sebenarnya ada tuduhan terkait dengan Budi Said, jadi, saya, saya pisahkanlah, ya, Pak. Jadi, berbeda sedikitlah, ada 2 yang, tetapi karena mereka semua GM jadi tersangka, karena mereka itu semua yang duduk sebagai jabatan GM, itu jadi tersangka sekarang.

Nah, apakah itu, tadi *kan* pertanyaan Pak Rudi tadi, apakah itu keputusan tidak diketahui oleh Direksi? *Kan* harusnya *enggak* mungkin, Pak. *Enggak* mungkin sama sekali bahwa Direksi sama sekali tidak mengetahui bahwa proses lebur cap.

Nah, yang kedua, lebur cap ini sudah menjadi bagian daripada prospektus tahun 1997. Artinya, dipahami oleh semua, bahwa ini adalah bagian daripada *line of business*. Dan kita sudah di audit selama, sampai tahun 2021 *kan* ada audit, kita ada pertanggungjawab dari para, para direksi pada masa-masanya, semuanya itu *kan* ada audit. Nah, saya *enggak* bilang bahwa yang dicantumkan oleh Kejaksaan semuanya itu salah. Pasti ada bagian-bagian tertentu yang sebenarnya juga ada potensinya memang, jadi, bisa dilihat sebagai merugikan. Cuma *kan* *enggak* bisa kita paparkan dengan lengkap, Pak, karena kita juga belum mempunyai kajian, ini yang kami lagi lakukan.

Bagaimana, Pak? Nah, kita lagi minta, Pak, tambahan lagi. *Kan* ada kajian-kajian sebelumnya *sih*, ada, tetapi dianggap kurang lengkap, Pak Martin. Sama sekali *enggak* dilihat sebagai suatu, apa. Harus ada angka-angkanya.

WAKIL KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Khusus saja kalau begitu. Kajiannya dari, dari Antam, Pak, ya?

DIREKTUR UTAMA PT ANEKA TAMBANG (NICOLAS D. KANTER):

Bukan Antam saja, Pak. Tetapi kita lagi minta justru dari pihak ketiga. Kalau Antam *kan* dibilang bahwa itu hanya membela diri. Jadi, kalau kita buat, kita harus buat, misalnya dari Lemhanas. Yang kita lagi coba adalah dari Lemhanas maupun dari LAPI ITB. Bagaimana, Bu?

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Izin, Pimpinan.

Pertanyaan pertama, kenapa kajian dari Lemhanas, Pak?

DIREKTUR UTAMA PT ANEKA TAMBANG (NICOLAS D. KANTER):

Eenggak, bukan, maksudnya kita *kan* ada orang-orang, ada ahli-ahli juga yang kemarin ini sudah pernah dipanggil sebagai saksi, Ibu. Kenapa kita bilang itu, jadi, kemungkinan *kan* karena menjadi saksi ahli juga, beliau bisa mengkoneksikan. Jadi, jadi mungkin saya.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Pimpinan, Pimpinan, Pimpinan.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Teman-teman, untuk yang terkait dengan kepentingan publik, informasi supaya tidak risau, perlu ada penegasan. Kemudian, pendalaman yang lebih dalam lagi, tentu kita akan undang Direktur Utama PT Antam dan beberapa yang tahu persis persoalan ini di dalam rapat secara khusus, saya kira itu, ya.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.):

Saya, saya sedikit saja, saya ingin bertanya saja, bukan bertanya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Karena kita ada rapat lagi, Panja Timah.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.):

Iya, Pimpinan, saya hanya ingin titip pertanyaan saja, nanti *eenggak* perlu dijelaskan di sini karena ini masih kita, banyak publiknya, tentang *tungsten*, nanti tolong dijelaskan nanti, Pak.



KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Apa?

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.):

Tungsten, nanti tidak perlu hari ini dijelaskan, tungsten ini yang mendekati emas, nanti kita perlu bicara khusus, ya, Mas, terima kasih.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Teman-teman, sepakat, ya, untuk PT Antam ini nanti kita undang kembali untuk lebih mendalami persoalan yang sekarang ini sedang menjadi pembicaraan publik, setuju?

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Sedikit, Pak, tadi *kan* disampaikan ada empat orang yang terus-menerus kalau, pokoknya siapa pun yang duduk di jabatan itu, bisa jadi tersangka, begitu *kan*, Pak. Artinya, ada aturan hukum dan tata kelola yang harus diperbaiki. Saya mengingatkan saja, tadi saya meminta aturan hukum dan alur, lebur, cetak, hingga stempel merek hulu, tengah, hilir di Antam.

Dan tadi Bapak mengatakan yang terakhir ada emas Antam yang bermasalah itu emas Antam yang dicetak pihak ketiga. Mohon kami minta data, siapa pihak ketiga itu.

Terima kasih.

DIREKTUR UTAMA PT ANEKA TAMBANG (NICOLAS D. KANTER):

Bukan, bukan pihak. Jadi, pihak ketiga yang melebur cetakan ke tempat kami, Bu.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Iya, siapa itu?

DIREKTUR UTAMA PT ANEKA TAMBANG (NICOLAS D. KANTER):

Itu yang data-data itu.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Nanti, nanti tertulis saja, Pak, jangan sekarang, terima kasih.



KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Silakan, Pak Dirut, masih ada? Cukup?

Yang lainnya nanti kita akan undang secara lebih khusus untuk RDP atau FGD untuk pendalaman di masing-masing *subholding*.

Bapak-Ibu dan saudara sekalian,

Saya ucapkan terima kasih. Walaupun kita belum bisa tuntas secara keseluruhan, tetapi sebagai langkah awal kita dalam rapat dengar pendapat ini untuk lebih melakukan fungsi pengawasan, supaya kinerja dari PT MIND ID ini bisa lebih maju dengan *good corporate governance*-nya yang lebih dioptimalkan ke depan sebagai *holding*.

Untuk itu, kita akan segera mengambil kesimpulan rapat hari ini.

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan, dalam artian dari apa yang disampaikan dalam paparan terkait dengan kinerja korporasi 2023, sekaligus memberikan apresiasi atas kinerja dan kontribusi kepada negara dalam bentuk pajak, dividen, maupun PNBP, PNBP yang tengah, di tengah fluktuasi harga beberapa komoditas tambang.

Apalagi, dengan penjelasan bahwa hilirisasi membutuhkan *capital* yang cukup menyedot pemasukan-pemasukan dari *subholding* ke *holding*, kita bisa menerima berdasarkan itu.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi VI DPR RI meminta PT MIND ID (Persero) untuk melakukan implementasi, ini penting sekali, Pak, *good corporate governance* secara konsisten, termasuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap implementasi *good corporate governance* di seluruh anggota *holding*.

Terutama juga ISO, kalau ISO diterapkan, kenapa sampai terjadi hal yang seperti di Antam misalnya? SOP ISO itu *kan* begitu detailnya. Apa sekarang ISO ini juga *enggak* berlaku lagi atau tidak dijalankan? Hal yang semacam itu kita memberikan tekanan dalam kesimpulan yang kedua.

Setuju, ya?

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi VI DPR RI mendorong PT Mineral Industri Indonesia (Persero) beserta anggota *holding* untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:



- a. Menyusun dan menyampaikan *roadmap* jangka pendek, menengah, dan panjang, dari hulu, tengah sampai hilir secara detail dalam pengembangan dan transformasi usaha kepada Komisi VI DPR RI.

Ini sebagai *legacy* kita juga, di akhir masa jabatan kita, kita ingin mendapatkan dari narasi besarnya seperti yang disampaikan ke Pak Dirut sampai hal-hal yang menyangkut kondisi saat ini, yang kita harapkan kita ingin *leading* dan *leader* hal-hal yang terkait dengan tidak hanya hilirisasi, bahkan industrialisasi di sektor pertambangan khususnya yang ada di MIND ID.

- b. Melakukan pengawasan. Jadi, kita dikaget-kagetkan terus, timah kita masih membuat panja tiba-tiba ada di emas, ya, nanti jangan-jangan ada di mana lagi. Kita ingin melakukan pengawasan secara ketat terhadap seluruh wilayah, ya, operasional tambang yang dikelola oleh MIND ID dan anggota *holding* dalam rangka mencegah praktik penambangan ilegal.

Tetapi, kita tadi juga belum dapat penjelasan yang kita tanyakan, Pak. Apakah emas yang dimasukkan atau mendapatkan logo Antam itu juga sumbernya emas legal atau ilegal? Nanti mohon dijelaskan dalam rapat khusus.

- c. Ini penting, melaksanakan pengembangan usaha yang berwawasan lingkungan, termasuk melaksanakan langkah-langkah pemulihan terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan, ya.

Ini bukan hal yang baru, baik oleh *private* maupun BUMN, banyak hal-hal yang dikeluhkan oleh berbagai NGO maupun masyarakat terkait dengan kerusakan lingkungan, ya. Dengan sumber daya alam kita manfaatkan sebesar-besar keuntungan rakyat, apalagi di dalam era perubahan iklim, situasi banjir maupun bencana-bencana yang lain, itu begitu banyaknya, juga bukan akibat karena alam yang merusak alam, tetapi juga karena alam yang dirusak manusia. Ini penting untuk poin c.

- d. Mengembangkan strategi-strategi yang inovatif untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar internasional.

Kita sampai hari ini juga belum tahu *way out*-nya. Kita punya berbagai komoditas baik di laut, di pertanian, perkebunan, dan sumber daya mineral, tetapi kita ini kalau soal harga komoditas kayak kambing *conggek*, ya, kita *enggak* bisa menentukan, *enggak* terlibat di dalam menentukan harga indeks komoditas di internasional. Panja, harga indeks komoditas nasional masih terus mencari variabel-variabel apa-apa saja yang sebenarnya kita ini, timah kita *ngikut* harga indeks komoditas dunia, kemudian sawit

juga, kemudian harga komoditas tambang yang lainnya, betul-betul kita tidak berdaya. Sementara kenapa Malaysia bisa punya? Kenapa di beberapa negara ASEAN ini kita bisa punya? Ini yang saya kira menjadi PR Komisi VI maupun pemerintah ke depan, kenapa harga indeks timah yang *dulu* tanpa indeks dunia kita malah untung, tetapi setelah ada harga indeks timah dunia kita malah rugi, selain ada masalah persoalan korupsi timah di, di PT Timah.

Nomor tiga, a, b, c, d, kita setuju, ya?

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi VI DPR RI meminta kepada PT Antam untuk memberikan penjelasan yang lebih *rinci* mengenai kronologis, dampak, potensi kerugian negara, dan perbaikan manajemen ke depan dari kasus 109 ton emas.

Tentunya juga paralel dengan hal-hal yang saat ini menjadi wilayah hukum yang sedang berlangsung, ya.

WAKIL KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kata “ke depannya” itu *enggak* usah.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Iya, “ke depannya”, *enggak* usah. Perbaikan manajemen dari kasus.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Iya.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Tambah sedikit tadi karena ada persoalan, *enggak*, aturan hukumnya itu *loh*, Pak, sehingga apakah yang salah itu orangnya? Atau ada aturan hukum yang memang harus kita kritisi dan kita usulkan untuk diperbaiki terhadap alur dari lebur cetak ini? Itu mohon ditambahkan, Pak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Di sini? Di empat?



F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Ini *kan* untuk memberikan lebih *rinci* mengenai sebelum kronologis aturan hukum lebur cetak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Mengenai aturan hukum.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Lebur cetak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Lebur cetak, *oke*.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Istilahnya lebur cetak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

PT Antam untuk memberikan penjelasan yang lebih *rinci* mengenai aturan hukum lebur cetak, kronologisnya apa ini?

WAKIL KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kronologis masalah.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kronologis masalah. Kronologisnya mengenai kronologis aturan hukum lebur cetak.

WAKIL KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Masalah dan dampaknya.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Masalah, dampak. Ini kronologinya mengenai kronologi di depan, Pak. Pak Dirut, *gimana* Pak Dirut Antam putusan keempat ini?

DIREKTUR UTAMA PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (HENDI PRIO SANTOSO):



Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Iya, *monggo*, Pak.

DIREKTUR UTAMA PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (HENDI PRIO SANTOSO):

Jadi *kan* tadi sudah saya sampaikan, sejak 2022 produk ini sudah di-*stop*, Pak, jadi, kita ke depan dipastikan tidak ada lagi produk ini, artinya perbaikannya sudah dilakukan.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke, setuju? Tinggal disampaikan, *kan*?

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Izin, Pak, tetapi tetap saja, ini *kan* masalah ada, Pak. Tetap saja, kita juga tidak bisa orang-orang yang, apakah orang-orang itu benar-benar dia bermasalah atau aturan hukumnya terhadap lebur cetak itu, saya kira itu juga menjadi bagian, Pak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke, setuju?

Komisi VI DPR RI meminta kepada PT Antam untuk memberikan penjelasan yang lebih *rinci* mengenai aturan hukum lebur cetak, kronologis masalah dan dampak, serta potensi kerugian negara dan perbaikan manajemen dari kasus 109 ton emas.

(RAPAT: SETUJU)

5. Komisi VI DPR RI ini meminta penjelasan lebih lanjut mengenai kepemilikan saham Indonesia dan pembayaran konsesi perusahaan PT Freeport Indonesia.

Ini siapa ini yang usul? Sudah, ya? Freeport *bagaimana*, Pak?

WAKIL PRESIDEN DIREKTUR PT FREEPORT INDONESIA (JENPINO NGABDI):

Izin, Bapak Pimpinan, sedikit koreksi, mungkin bukan konsesi, pembayaran akuisisi saham PT Freeport Indonesia.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke, pembayaran akuisisi saham PT Freeport.

Meminta penjelasan lebih lanjut mengenai kepemilikan saham Indonesia dan pembayaran akuisisi saham Freeport.

Pak Jenpino, oke, yang putusan lima? Pak Dirut?

DIREKTUR UTAMA PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (HENDI PRIO SANTOSO):

Izin, Pimpinan. Ini maksudnya yang ke depan, Pak, ya? Yang tambahan 10%?

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Iya, *toh*.

DIREKTUR UTAMA PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (HENDI PRIO SANTOSO):

Yang tambahan 10%, Bu, untuk *extension* UPK? Iya, *enggak*, jadi begini, Bu.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Enggak jadi 61%?

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Jadi tadi terkaget-kaget, Pak, ternyata ini baru akan berlaku, ya. Dulu pikiran kita *kan*.

DIREKTUR UTAMA PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (HENDI PRIO SANTOSO):

Mungkin, mungkin saya jelaskan, Bu Rieke dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VI yang kami hormati, ini masih berupa rencana *lah* dan baru berupa gagasan, jadi, belum, belum ada implementasi. Setahu kami, belum ada *terms and conditions* yang mengikat kedua belah pihak, Pak, antara Pemerintah dengan Freeport McMoran juga belum, antara MIND ID, ya.

Enggak, yang 51 sudah, tetapi yang rencananya tambahan 10% itu, itu masih dalam proses, Pak. Ya, jadi, Bu Rieke, dapat kami jelaskan, itu masih berupa gagasan dan akan ditindak lanjuti dengan diskusi dan negosiasi. Jadi, sampai sekarang belum ada keputusan yang mengikat.



F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Izin, Pimpinan, izin. Yang 51% itu di 2000, rentetan dari 2018, lalu itu kemudian menjadi nantinya di bentuk *Holding MIND ID*, itu terjadinya di 2023 tahun kemarin. Nah, kemudian rencana ada perpanjangan kontrak.

DIREKTUR UTAMA PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (HENDI PRIO SANTOSO):

Itu belum, Bu.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Nah, itu belum, tetapi sudah ada di media, sehingga kita, belumnya itu kenapa? Pastikan ada basis argumentasinya, Pak, ada basis argumen. Tertulis saja, Pak.

DIREKTUR UTAMA PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (HENDI PRIO SANTOSO):

Dapat kami jelaskan, MIND ID selaku wakil negara, yang terkait dengan rencana ini, kami masih dalam proses diskusi dan negosiasi. Jadi, belum ada usulan yang, apa, *binding* atau mengikat yang dapat kami sampaikan pada saat ini, Bu.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke, begini saja, Pak.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kami meminta MIND ID melaporkan mengenai perkembangan kepemilikan saham Indonesia dalam, dalam, dalam perubahan, ya? Penambahan?

DIREKTUR UTAMA PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (HENDI PRIO SANTOSO):

Penambahan.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Penambahan.



DIREKTUR UTAMA PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (HENDI PRIO SANTOSO):

Penambahan.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Penambahan, dalam penambahan, ya. Jadi itu meminta.

DIREKTUR UTAMA PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (HENDI PRIO SANTOSO):

Mungkin *ditambahin* rencana, Bapak.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Rencana, iya, dalam rencana penambahan saham PT Freeport. Nah, dalam rencana penambahan saham PT Freeport, *oke*.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Pak, Izin, Pak, kalau begitu, terakhir, mungkin dari MIND ID buat *release*, Pak, kalau begitu karena berita ini *kan* juga, ini CNBC dan sebagainya sudah menulisnya seperti ini. Jadi.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Apa beritanya, Mbak?

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

“Sah, Jokowi perpanjang izin tambang Freeport sampai cadangan habis”. *Kan* belum baru kajian, keluarkan *release*, Pak. Ini *kan* bikin orang panas.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ini baru kajian, ya? *Oke*, jadi di situ kita meminta penjelasan lebih lanjut mengenai kepem, bukan.

WAKIL KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Penambahan langsung, rencana penambahan.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Penambahan, Komisi VI DPR RI meminta penjelasan lebih lanjut mengenai rencana penambahan saham Indonesia di PT Freeport.



F-PD (Dr. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Pak Ketua, ini memang pertanyaan-pertanyaan yang tadi belum dijawab juga sebetulnya, *kok* tiba-tiba ke kesimpulan, begitu. *Kan* kita juga belum membahas ini tadi, *enggak* ada jawaban ini, begitu. Kita bertanya, belum ada jawaban, *kok* masuk kesimpulan, begitu.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ya, karena dari, atau kita ingin ada pendalaman, setelah ini ke masing-masing, ya. Catatan saja, ke, masukan catatan saja ini, Pak. Yang lima ini catatan dengan kesimpulan.

Oke, kemudian, nanti kita, diturunkan saja, di catatan saja, yang lima ini.

F-PAN (Hj. INTAN FAUZI, S.H., LL.M.):

Izin, Ketua. Izin, Pak Bimo.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ya, Mbak Intan.

F-PAN (Hj. INTAN FAUZI, S.H., LL.M.):

Pak Bimo, terkait nomor 4, menurut saya ini *kan corporate action* yang belum sama sekali, masih *preliminary*, malah mungkin

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Yang Freeport, Mbak, ya?

F-PAN (Hj. INTAN FAUZI, S.H., LL.M.):

Yang Freeport, yang tadi yang poin 4 *kan* tadi, ya?

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Lima.

F-PAN (Hj. INTAN FAUZI, S.H., LL.M.):

Eh, lima, *sorry*, masih di 5, ya, mau dipin.

Menurut saya, kalau, tadi saya setuju dengan Pak Hero, tidak di kesimpulan, di catatan pun menurut saya, belum perlu, karena ini *kan corporate action* yang memang belum terjadi dan pembicaraannya juga belum, masih sangat jauh.



Terima kasih.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Izin, Mbak, maaf.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Jadi, begini *loh* ya, kita ini *kan* merespons publik. Publik ini, Mbak Intan, pembicaraan mengenai perpanjangan sampai cadangan habis ini menjadi gunjingan, dibuka saja di media sosial, ya. Ada yang lebih menarasikan penjajahan di atas zaman kolonial, macam-macam *lah*, Mbak. Maka kita merespons itu, kenapa ini saya masukkan, supaya kita masih dalam kajian dan kita juga akan minta penjelasan, itu saja. Tetapi maka kalau jadi kesimpulan, saya setuju, kita jadikan catatan saja, nanti kita akan undang PT Freeport secara khusus di dalam rapat RDPU.

WAKIL KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Atau PT Freeport mengundang kita juga boleh.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ya, saya kira itu, ya. *Oke*, itu kita masukkan dalam catatan saja, tidak masuk dalam kesimpulan.

Dan kesimpulan ke-5,

5. DPR RI meminta PT MIND ID dan anggota *holding* untuk dapat memberikan jawaban-jawaban tertulis dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum, intinya sebelum kita rapat dengan Menteri BUMN, Pak, biasanya RDP-RDP ini kita pakai untuk bahan rapat kerja dengan Pak Menteri, itu paling lama lima hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI, terutama hal-hal yang memang sebagai perusahaan terbuka itu tidak bisa dijawab secara terbuka di sini, saya kira itu.

(RAPAT: SETUJU)

Teman-teman, kita akhiri. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Terakhir, Pak, terakhir, Pak. Pak, terakhir, Pak, Izin, Pak.



Tadi disampaikan oleh Pak Hendi bahwa di awal itu MIND ID sudah punya peta inventarisir masalah dari setiap BUMN yang bergabung di bawahnya. Nah, kami juga minta jawaban tertulis saja, Pak, apa inventarisir masalah itu. Karena saya ingat *banget* waktu Pak Nicolas ini baru masuk ke Antam, lalu ada kasus emas itu, beliau hampir pingsan itu, Pak.

Jadi, banyak orangnya sebenarnya *enggak, enggak*, harusnya tidak terdampak, tetapi karena inventarisir masalah, kasihlah ke kita, Pak. Kita juga Komisi VI kayak dewan *dongok* ini, tahu-tahu ribut ini, tahu-tahu ribut itu, padahal *kan* kita sudah minta inventarisir masalah dari awal. Mohon tertulis, Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA/WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Dengan berakhirnya penajaman dari Teh Rieke yang terakhir, semoga *enggak* ada tambahan lagi, kami ucapkan banyak terima kasih pada Pak Direktur MIND ID, yang telah memberikan jawabannya, walaupun semuanya belum memuaskan, Pak Dirut juga belum puas karena waktu juga terbatas, begitu juga para Direktur *Subholding*.

Ini sebagai langkah awal kita untuk sesuatu yang baik, untuk kemajuan BUMN Pertambangan kita. Saya mengucapkan sekali terima kasih. Juga atas pertanyaan dan tanggapan penajaman dari kawan-kawan Anggota Komisi VI, yang juga telah ikut rapat sampai selesai, apalagi dengan keputusan terhadap kesimpulan yang telah kita sepakati bersama.

Dengan demikian, rapat kita akhiri.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.39 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

DEWI RESMINI, S.E., M.Si.
NIP. 197104071992032001

